

Katalog: 2302004.15

# INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

PROVINSI JAMBI  
FEBRUARI 2025

Volume 5, 2025





# INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

PROVINSI JAMBI  
FEBRUARI 2025

Volume 5, 2025

# INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI JAMBI FEBRUARI 2025

Volume 5, 2025

Katalog : 2302004.15  
Nomor Publikasi : 15000.25043

**Ukuran Buku** : 21,0 cm x 29,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xviii+87 halaman

**Penyusun Naskah:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

**Pembuat Kover:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

**Penerbit:**

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

**Sumber Ilustrasi:**

Canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

# **TIM PENYUSUN**

## **INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA**

PROVINSI JAMBI FEBRUARI 2025

Volume 5, 2025

### **Pengarah:**

Agus Sudibyo, M.Stat.

### **Penanggung Jawab:**

Sisilia Nurteta, S.ST., M.Si.

### **Penyunting:**

Rita Rifáti, S.ST., M.Si.

### **Penulis Naskah:**

Dian Primasari Azwir, S.ST., M.Si

### **Pengolah Data**

Dian Primasari Azwir, S.ST., M.Si

### **Pembuat Kover:**

Juliana Marintan, S.ST.

### **Penata Letak:**

Rita Rif'ati, S.ST, M.Si



# KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilaksanakan oleh BPS secara semesteran (Februari dan Agustus) sejak tahun 2015. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan hasilnya diharapkan dapat memotret dinamika ketenagakerjaan secara berkesinambungan. Sakernas yang dilaksanakan pada bulan Februari dirancang untuk menghasilkan estimasi indikator ketenagakerjaan pada tingkat provinsi, sedangkan Sakernas Agustus mampu menyajikan estimasi indikator hingga tingkat kabupaten/kota. Sejak terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di akhir tahun 2022 maka pada publikasi ini ditampilkan indikator ketenagakerjaan pada 38 provinsi.

Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2024 menyajikan perkembangan indikator pasar tenaga kerja yang mengacu pada (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*) edisi 9 tahun 2015 yang direkomendasikan oleh ILO (*International Labour Organization*). Periode Sakernas yang disajikan dalam publikasi ini adalah Februari 2024, Agustus 2023 dan Februari 2025.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menjelaskan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Penghargaan yang setinggitingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan publikasi edisi berikutnya.

Jambi, November 2025  
Kepala BPS Provinsi Jambi



Agus Sudibyo, M.Stat.





# RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Sakernas Februari 2025 menunjukkan adanya peningkatan sejumlah 28.128 orang penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dibanding Februari 2024. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan dari 1.919.342 orang menjadi 1.884.335 orang pada Februari 2025.

TPAK Februari 2025 mencapai 67,11 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Jambi, 67 penduduk di antaranya termasuk dalam angkatan kerja. Capaian ini mengalami penurunan 1,76 persen dari Agustus 2024 dan meningkat 0,02 persen dibandingkan Februari 2024.

Pada Februari 2025, EPR mencapai 64,10 persen atau dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas terdapat sekitar 64 orang yang bekerja pada Februari 2025. Dalam periode Februari 2024 hingga Februari 2025, EPR cenderung mengalami penurunan.

Distribusi penduduk bekerja jika dirinci berdasarkan status pekerjaan utama tidak jauh berbeda baik pada periode Februari 2024, Agustus 2024 maupun Februari 2025. Penduduk bekerja didominasi oleh mereka yang berstatus berusaha (39,24 persen). Persentase terbesar berikutnya, yaitu buruh/karyawan/pegawai (38,31 persen), pekerja keluarga (12,32 persen) dan urutan terakhir adalah pekerja bebas (10,13 persen).

Struktur lapangan pekerjaan utama di Provinsi Jambi menunjukkan pola yang kurang lebih sama baik pada Februari 2024, Agustus 2024 maupun Februari 2025. Penduduk bekerja pada Februari 2025 masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase mencapai 42,64 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah kategori perdagangan besar dan eceran, yaitu sebesar 17,45 persen, dan kategori industri pengolahan sebesar 8,18 persen.

Jika dilihat menurut jenis pekerjaan utama, pada Februari 2025 mempunyai pola yang sama sebagaimana periode sebelumnya. Pada Februari 2025 penduduk bekerja didominasi oleh tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dengan persentase sebesar 40,81 persen. Posisi berikutnya pada jenis pekerjaan tenaga produksi,

operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar yang mencapai 20,70 persen, dan posisi ketiga terbesar adalah tenaga usaha penjualan sebesar 16,45 persen.

Tingkat pekerja paruh waktu berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025 mencapai 30,28 persen. Dapat diartikan dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 30 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak punya keinginan untuk menambah pekerjaan (jam kerja). Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2025 menurun 3,62 persen dibandingkan Februari 2024 dan meningkat 4,74 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

Tingginya persentase pekerja tidak penuh (39,26%) menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang belum terserap sepenuhnya dalam pekerjaan yang produktif dan stabil, meskipun secara status mereka termasuk bekerja. Sedangkan, persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja normal (35–48 jam atau lebih) sebesar 37,06 persen. Jika dilihat menurut sektornya, hasil Sakernas Februari 2025 menunjukkan bahwa sebesar 54,57 persen penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi bekerja pada kegiatan informal. Persentase ini mengalami penurunan baik jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2024 dan Agustus 2024.

Sementara itu, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) mencapai 4,48 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Jambi, terdapat sekitar 4-5 orang penganggur. Persentase ini naik 0,03 persen dari Februari 2024 dan jika dibandingkan Agustus 2024 cenderung sama. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, TPT tertinggi terdapat pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas, yaitu sebesar 7,42 persen. Hal ini mengindikasikan banyak tenaga kerja lulusan SMA yang tidak terserap di pasar kerja. Hal ini menjadi menarik, karena meskipun banyak lowongan pekerjaan yang mencantumkan syarat minimal SMA, ternyata fakta di lapangan Tingkat pengangguran lulusan SMA masih tergolong tinggi. Hal ini bisa terjadi karena meskipun syarat minimal SMA, namun Perusahaan tetap mencari pelamar dengan pengalaman kerja atau keterampilan tambahan, sehingga banyak lulusan baru yang tanpa pengalaman dan keterampilan tidak diterima.

TPT penduduk kelompok umur muda mencapai 18,28 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 18 orang yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi pada penduduk usia muda menunjukkan bahwa kelompok umur 15–24 tahun masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, mencerminkan tantangan dalam transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Jumlah setengah penganggur di Provinsi Jambi pada Februari 2025 mencapai 161.583 orang, yang terdiri dari 111.335 orang laki-laki dan sisanya sebanyak 50.248 orang perempuan. Jika dibandingkan Februari 2024, jumlah setengah pengangguran pada Februari 2025 mengalami penurunan sebanyak 30.269 orang. Jika dibandingkan Agustus 2024, jumlah setengah pengangguran naik 7.118 orang.

Hasil Sakernas Februari 2025 menunjukkan tingkat ketidakaktifan di pasar kerja pada penduduk usia kerja di Provinsi Jambi mencapai 31,13 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Provinsi Jambi, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sekitar 31 orang. Tingkat ketidakaktifan mengalami penurunan selama setahun terakhir jika dibandingkan dengan Februari 2024 sebesar 1,78 persen.

Sakernas Februari 2025 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada kontribusi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan jika dibandingkan dengan Februari 2024 dan Agustus 2024. Pada Februari 2025, sebagian besar angkatan kerja masih didominasi oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan dasar sebesar 46,72 persen. Sementara itu, angkatan kerja yang berpendidikan menengah sebesar 36,33 persen dan pendidikan tingkat tinggi sebesar 16,43 persen. Di samping itu, masih terdapat angkatan kerja yang tidak pernah sekolah, yaitu sekitar 0,53 persen.

Angka rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2025 mencapai 2,52 juta rupiah. Rata-rata upah/gaji ini meningkat dibandingkan Februari 2024 dengan besarnya peningkatan sebesar 0,13 juta rupiah.



# DAFTAR ISI

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA  
PROVINSI JAMBI FEBRUARI 2025  
Volume 5, 2025

	<u>Halaman</u>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan.....	3
Sakernas dan KILM .....	5
Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan .....	7
Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM .....	10
<b>BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA .....</b>	<b>13</b>
KILM 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	15
KILM 2 Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja ( <i>Employment to Population Ratio-EPR</i> ) .....	18
KILM 3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama .....	22
KILM 4 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.....	24
KILM 5 Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama.....	29
KILM 6 Pekerja Paruh Waktu .....	30
KILM 7 Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja .....	32
KILM 8 Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal.....	34

<b>BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN .....</b>	<b>41</b>
KILM 9 Pengangguran .....	41
KILM 10 Pengangguran pada Kelompok Umur Muda .....	42
KILM 12 Setengah Pengangguran ( <i>Underemployment</i> ).....	45
<b>BAB 4 INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA .....</b>	<b>55</b>
KILM 13 Tingkat Ketidakaktifan.....	55
<b>BAB 5 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF .....</b>	<b>85</b>
KILM 14 Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf.....	59
<b>BAB 6 INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA.....</b>	<b>632</b>
KILM 15 Upah dan Biaya Kompensasi .....	92
<b>CATATAN TEKNIS.....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2024–2025 ...	23
Tabel 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori), 2024–2025 .....	25
Tabel 3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, 2024–2025 .....	29
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2024–2025 .....	41
Tabel 5 Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Umur Dewasa di Provinsi Jambi 2024–2025 .....	44
Tabel 6 Penduduk Bekerja yang Termasuk Setengah Penganggur, 2024–2025 .....	49
Tabel 7 Indikator Setengah Penganggur (persen), 2024–2025 .....	46
Tabel 8 Tingkat Ketidaktifan (persen), 2024–2025 .....	55
Tabel 9 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2024–2025 .....	60
Tabel 10 Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai (juta rupiah), 2024–2025 .....	92





# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2024–2025 .....	15
Gambar 2 TPAK Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024–2025 .....	16
Gambar 3 TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2024 .....	17
Gambar 4 <i>Employment to Population Ratio</i> (EPR), 2024–2025.....	18
Gambar 5 <i>Employment to Population Ratio</i> (EPR) Menurut Jenis Kelamin, 2024–2025 .....	19
Gambar 6 <i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur, 2024–2025 ..	20
Gambar 7 <i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur,.....	21
Gambar 8 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2025 .....	28
Gambar 9 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama .....	30
Gambar 10 Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2024–2025 .....	31
Gambar 11 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), .....	32
Gambar 12 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja,.....	33
Gambar 13 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja .....	34
Gambar 14 Persentase Penduduk Bekerja pada Kegiatan Formal/Informal, 2024–2025.....	35
Gambar 15 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2024–2025 .....	37
Gambar 16 TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024–2025 .....	43
Gambar 17 TPT Penduduk Umur Muda (persen), 2024–2025 .....	44
Gambar 18 TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024–2025.....	45
Gambar 19 Share Penganggur Umur Muda (persen), 2024–2025 .....	48
Gambar 20 Distribusi Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan .....	51
Gambar 21 Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur .....	80
Gambar 22 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2024–2025 .....	87
Gambar 23 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari 2024–Februari 2025 .....	88
Gambar 24 Diagram Ketenagakerjaan dalam Sakernas .....	95



# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KBJI	Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



# 1 PENDAHULUAN

Pada publikasi ini KILM yang digunakan sebagai rujukan adalah edisi ke-9 yang diterbitkan pada tahun 2015

<https://jambi.bps.go.id>





# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertujuan untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Jambi. Sejak Triwulan I Februari 2011, BPS menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization-ILO), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (Key Indicators of the Labour Market-KILM). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Sejak tahun 2011, KILM Indonesia merujuk pada edisi ke-6 yang diterbitkan ILO. Untuk edisi KILM Indonesia tahun 2021 ini, KILM yang digunakan sebagai rujukan adalah edisi ke-9 yang diterbitkan ILO pada tahun 2015.

### **Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan**

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Di antara survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan, yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014, Sakernas tidak dilaksanakan karena adanya berbagai alasan. Sejak tahun 2015, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel Sakernas se-Indonesia pada Agustus 2015 sekitar 200.000 rumah tangga, sedangkan pada Agustus 2016 sekitar 50.000 rumah tangga. Pada Sakernas Agustus 2018, jumlah sampel kembali sebanyak 200.000 rumah tangga. Mulai tahun 2019, Sakernas mendapatkan penambahan sampel pada Februari menjadi 75.000 rumah tangga dan sampel Agustus berjumlah 300.000 rumah tangga.

Pada Sakernas Februari 2025, dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga (nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat lahir, bulan dan tahun lahir serta umur). Pada anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas, dikumpulkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), status perkawinan, partisipasi sekolah, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal 5 tahun yang lalu, disabilitas, kegiatan bekerja seminggu terakhir, pekerjaan utama, kegiatan mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, pengalaman kerja, kegiatan lain, Program Kartu Prakerja, program yang dibutuhkan dalam situasi pandemi/krisis, dan pengalaman kerja di luar negeri.



## Sakernas dan KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Akan tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, SUPAS, dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pengguna data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1. Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2. Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3. Kualitas Petugas Lapangan

Petugas lapangan Sakernas Februari 2025 terdiri dari pengawas dan pencacah. Pengawas merupakan pegawai organik BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota (diutamakan lulusan minimal D-III dan berpengalaman dalam pengumpulan data Sakernas). Pencacah adalah pegawai organik BPS kabupaten/kota maupun

nonorganik (mitra statistik) BPS yang ditunjuk dan diutamakan berpendidikan minimal SLTA dan berpengalaman dalam pengumpulan data Sakernas.

Secara umum, seorang pencacah lapangan (PCL) akan bertugas melakukan pencacahan pada 2 sampai 3 Blok Sensus (sebagian besar PCL akan bertugas pada 3 blok sensus). Seorang pengawas/pemeriksa lapangan (PML) bertugas mengawasi 2 sampai 3 PCL.

#### 4. Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

Pada Agustus 2020, dilakukan penyempurnaan kuesioner, yaitu menyesuaikan kondisi “new normal” pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Perubahan utama kuesioner tersebut diantaranya adalah penggunaan konsep ketenagakerjaan menurut konsep ICLS-13, penambahan pertanyaan terkait dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan berdasarkan rekomendasi ILO, penyederhanaan kuesioner serta pengelompokan pertanyaan menurut masing-masing topik. Pada Sakernas Februari 2025, kuesioner yang digunakan secara umum masih mengacu kepada kuesioner Sakernas Agustus 2021, namun kembali dilakukan penyempurnaan dan penambahan beberapa pertanyaan.

#### 5. Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman. Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

1. Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
2. Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*-OECD) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

## **Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan**

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

### **1. Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*)**

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 9, 10, dan 12), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci, yaitu tingkat ketidakaktifan dari indikator bukan angkatan kerja (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas pekerjaan sehingga disebut "layak" dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam penduduk bekerja berdasarkan

status pekerjaan utama, lapangan pekerjaan utama, dan jenis pekerjaan utama (KILM 3, KILM 4, dan KILM 5); jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* pada indikator penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja (KILM 7); penduduk yang bekerja di kegiatan informal (KILM 8); dan setengah pengangguran (KILM 12).

## 2. Pemantauan Pencapaian Tujuan Agenda 2020 *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs adalah tujuan yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan secara global, tujuan ini merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Sakernas sebagai salah satu sumber data penyusun indikator SDGs diharapkan dapat memenuhi informasi yang diperlukan.

Indikator SDGs yang dapat dihasilkan dari Sakernas diantaranya:

- Proporsi wanita yang memegang jabatan manajerial.
- Proporsi pekerjaan informal di sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.
- Proporsi penduduk muda (15–24 tahun) yang tidak sedang mengikuti pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET).
- Persentase jumlah anak usia 5–17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak, menurut kelompok jenis kelamin dan umur.
- Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja dan tingkat pertumbuhan pekerja, menurut jenis kelamin.
- Pekerja sektor manufaktur sebagai proporsi dari total pekerja.

## 3. Memantau Kesenjangan Gender di Pasar Tenaga Kerja

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

## 4. Mengkaji Tenaga Kerja di Era Globalisasi

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk

menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

## **Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM**

Semakin hari semakin banyak negara yang menghitung statistik ketenagakerjaan khususnya angka pengangguran. Akan tetapi perlu kehati-hatian dalam menggunakan angka pengangguran tersebut, apalagi untuk menganalisis kondisi pasar kerja. Salah satu keuntungan menggunakan angka pengangguran adalah relatif mudah dalam hal pengumpulan data dan untuk perbandingan antardaerah. Akan tetapi adalah kekeliruan, jika hanya melihat angka pengangguran saja tanpa melihat unsur-unsur pasar tenaga kerja yang lain. Penting untuk disadari bahwa pengangguran “hanya” salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan.

Langkah pertama dalam menganalisis kondisi pasar kerja adalah membagi penduduk dalam dua kategori, yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Batas penduduk usia kerja di Indonesia adalah 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja-KILM 1) dan yang tidak aktif dalam perekonomian (bukan angkatan kerja-KILM 13). Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja (KILM 2) dan menganggur (KILM 9). Kualitas angkatan kerja bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang dicapai, semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas relatif semakin baik (KILM 14).

Apabila di suatu negara, banyak penduduk yang masuk kategori pengangguran atau bukan angkatan kerja maupun keduanya, menunjukkan adanya masalah tenaga kerja yang kurang termanfaatkan (*underutilized*). Dalam menghadapi situasi tersebut pemerintah seharusnya berusaha untuk menganalisis apa alasan penduduk tidak aktif di pasar kerja, sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat.

Apabila diketahui mayoritas bukan angkatan kerja adalah perempuan, dan alasannya karena perempuan memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga, pemerintah mungkin dapat membuat kebijakan yang dapat mendorong perempuan masuk ke pasar kerja. Misalnya dengan membangun pusat-pusat penitipan anak, memberikan jam kerja yang lebih fleksibel terhadap perempuan, dan lain-lain.

Untuk mereka yang tidak aktif pada pasar kerja karena penyandang cacat (disabilitas), pemerintah bisa membuat peraturan agar tiap perusahaan harus mempekerjakan penyandang cacat atau bisa memberikan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan/gedung perkantoran sehingga memudahkan mereka untuk bekerja.

Masalah yang lebih sulit dipecahkan oleh pemerintah adalah bagaimana cara mengembalikan orang yang “putus asa” (*discourage worker*) masuk kembali ke pasar kerja. Hal tersebut disebabkan karena orang yang “putus asa” merasa tidak ada pekerjaan yang sesuai, atau kualifikasi mereka kurang, atau bahkan mereka tidak tahu kemana harus mencari kerja. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah bisa membuat pelatihan-pelatihan kerja sesuai minat dan kemampuan mereka, atau membuat lembaga yang dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi mereka.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin, daerah tempat tinggal (perkotaan-perdesaan), tingkat pendidikan (KILM 9), dan kelompok umur muda (KILM 10), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi dan pengalaman kerja (bila tersedia). Karakteristik tersebut juga penting untuk dianalisis, sehingga dapat dicari akar masalahnya dan bisa diberikan solusi kebijakan yang tepat. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan kemiskinan yang substansial di suatu negara, sementara

tingkat pengangguran yang tinggi bisa terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Di negara-negara berkembang umumnya tidak tersedia jaminan perlindungan sosial (misalnya: asuransi pengangguran dan tunjangan kesejahteraan). Akibatnya mereka yang relatif "kaya" yang mampu menganggur. Pengangguran adalah barang mewah, hanya mereka yang mempunyai tabungan atau pendapatan di luar pekerjaan (*non-labor income*) yang bisa menganggur. Sementara mereka yang miskin, tidak bisa menganggur, mereka harus bekerja apa saja untuk dapat hidup (*too poor to be unemployed*). Sehingga penting untuk menelaah dari total penduduk bekerja di Provinsi Jambi, berapa banyak yang mempunyai pekerjaan yang layak. Pekerjaan layak adalah pekerjaan yang dilakukan atas kemauan atau pilihan sendiri, memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup secara layak dan berharkat, serta menjamin keselamatan fisik maupun psikologis. Kelayakan pekerjaan dapat dilihat dari status pekerjaan seseorang (KILM 3), apakah dia sebagai buruh/karyawan yang cenderung mempunyai penghasilan tetap atau hanya sebagai pekerja bebas pertanian yang penghasilannya tidak menentu. Lapangan pekerjaan (KILM 4), jenis pekerjaan (KILM 5), pekerja paruh waktu (KILM 6), jumlah jam kerja (KILM 7), kegiatan informal (KILM 8), dan setengah penganggur (KILM 12) dapat dijadikan indikator untuk melihat seberapa layak pekerjaan yang tersedia di Provinsi Jambi. Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut sejahtera atau tidak dapat dilihat dari upah/pendapatannya (KILM 15).





# 2 PARTISIPASI & INDIKATOR TENAGA KERJA

TPAK lansia mencapai 52,06 persen, artinya 5 dari sepuluh lansia di Provinsi Jambi masih aktif di pasar kerja



<https://jambi.bps.go.id>

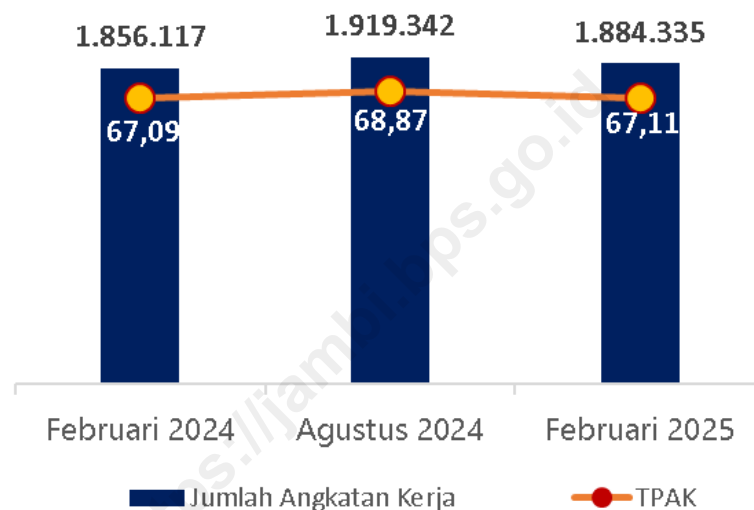


## BAB 2

# PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

### KILM 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

**“Jumlah angkatan kerja dan TPAK pada Februari 2025 mengalami peningkatan dibanding Februari 2024”**



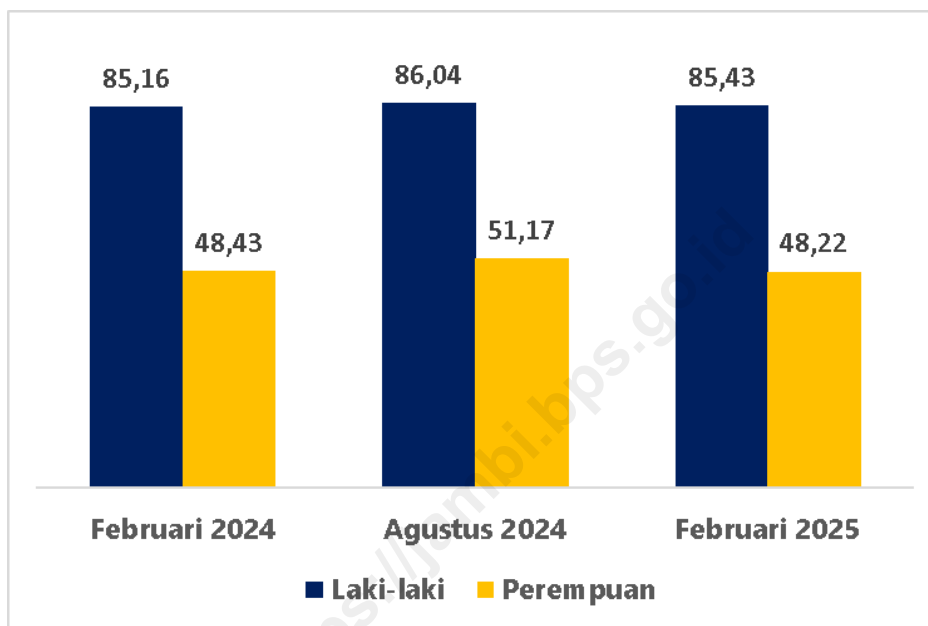
Sumber: Sakernas Februari 2024–Februari 2025

#### Gambar 1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2024–2025

Hasil Sakernas Februari 2025 menunjukkan adanya peningkatan sejumlah 28.218 orang penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dibanding Februari 2024. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan dari 1.919.342 orang menjadi 1.884.335 orang pada Februari 2025. Seiring dengan penurunan Angkatan Kerja angka TPAK Februari 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2024 sebesar 1,76 persen poin dan mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibanding Februari 2024 (Gambar 1).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator utama dari potensi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK dapat fluktuatif dikarenakan adanya kebijakan, perubahan sosial budaya, iklim perekonomian, geografis, dan sebagainya (BPS, 2022).

**“TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi daripada TPAK perempuan”**

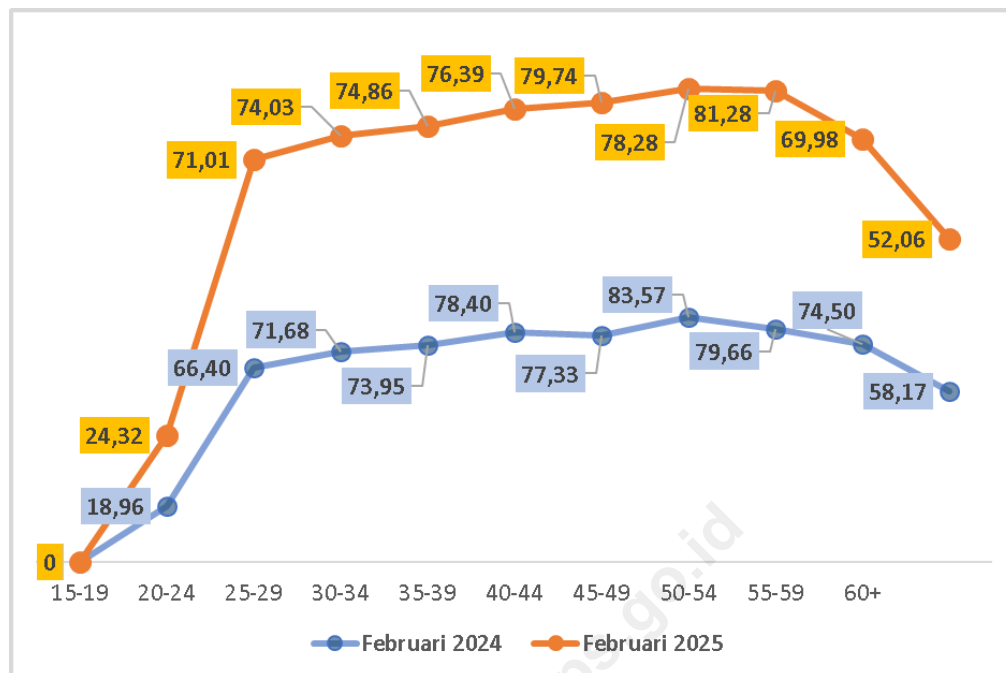


Sumber: Sakernas Februari 2024 – Februari 2025

**Gambar 2 TPAK Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024–2025**

Secara umum, dari waktu ke waktu, TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Kondisi ini selalu sama baik pada Februari 2024, Agustus 2024, maupun Februari 2025 yang menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi hingga sekitar 1,7 kali TPAK perempuan. Sebagai gambaran, TPAK laki-laki pada Februari 2025 mencapai 85,43 persen, sedangkan pada perempuan hanya sebesar 48,22 persen. Nilai TPAK Februari 2025 tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, sekitar 85–86 orang yang masuk dalam angkatan kerja. Sementara itu, dari 100 perempuan usia kerja, sekitar 48 orang yang termasuk angkatan kerja (Gambar 2).

**“Pola TPAK menurut kelompok umur menunjukkan angka rendah di usia muda, kemudian meningkat di usia produktif dan kembali turun seiring pertambahan usia”**



Sumber: Sakernas Februari 2024–Februari 2025

**Gambar 3 TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2024 dan Februari 2025**

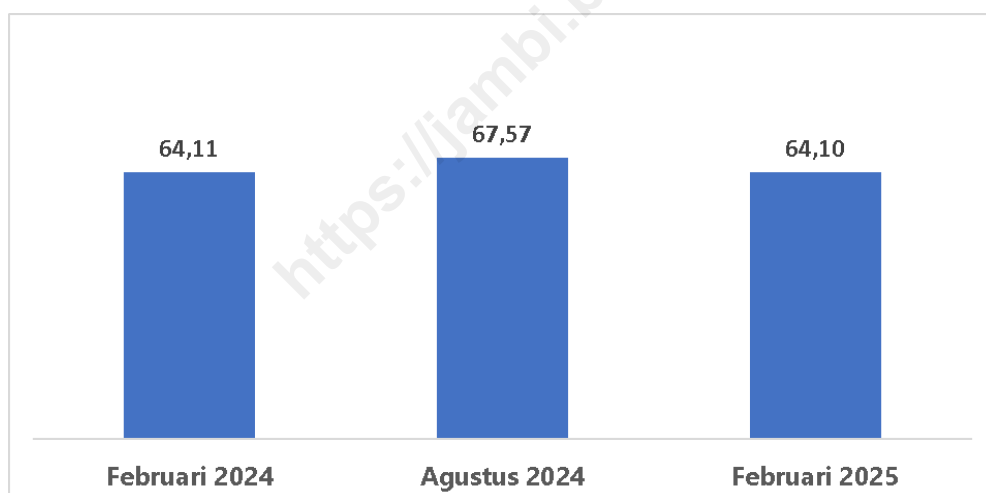
Apabila diamati TPAK menurut kelompok umur, polanya menunjukkan seperti huruf “U” terbalik sebagaimana dalam Gambar 3. Pada kondisi Februari 2025, tingkat partisipasi penduduk pada kelompok umur 15–19 tahun mencapai 24,32 persen. Rendahnya angka partisipasi kerja pada kelompok umur ini menjadi gambaran bahwa sebagian besar kelompok umur tersebut masih aktif bersekolah dan hanya sebagian kecil yang aktif di pasar kerja. TPAK Februari 2025 semakin meningkat seiring peningkatan kelompok umur, dan mencapai puncaknya pada kelompok umur 50–54 tahun (mencapai angka 81,28 persen), dan kembali menurun pada kelompok umur berikutnya hingga pada usia yang semakin tua. Pola yang

semakin menurun ini dapat mengindikasikan gambaran tenaga kerja yang semakin tidak produktif seiring dengan bertambahnya umur.

## **KILM 2 Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*)**

**“Terdapat peningkatan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR) selama setahun terakhir ”**

*Employment to Population Ratio* (EPR) menjadi informasi dalam pengambilan keputusan penciptaan lapangan kerja (BPS, 2022). Semakin tinggi nilai EPR, semakin banyak penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja. Sedangkan, nilai EPR yang rendah mengindikasikan banyak tenaga kerja masih belum terserap, sehingga perlu penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak.



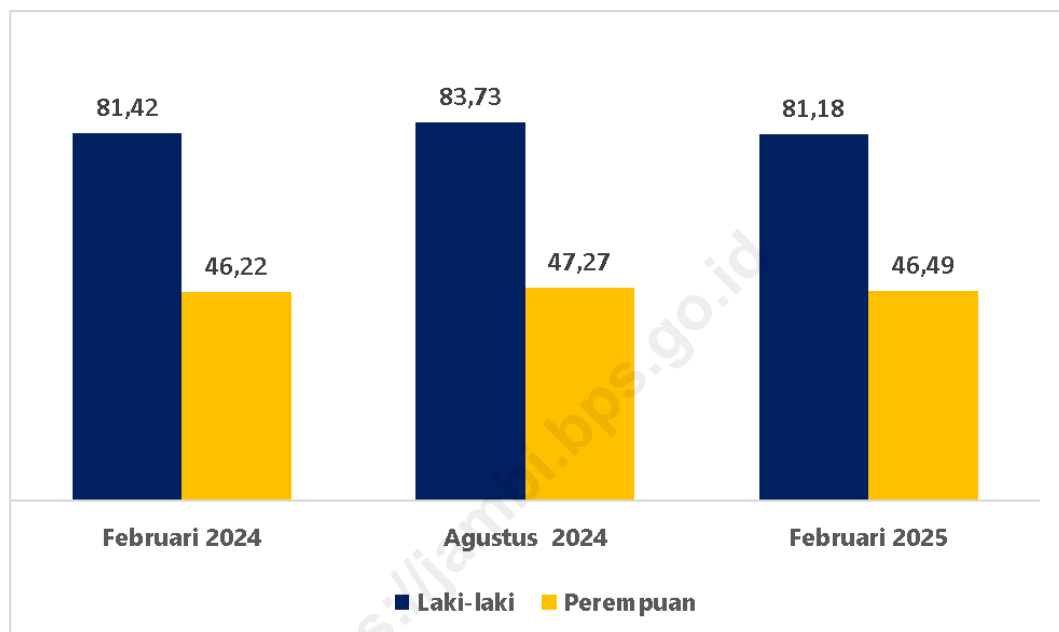
Sumber: Sakernas Februari 2024–Februari 2025

**Gambar 4 *Employment to Population Ratio (EPR)*, 2024–2025**

Tingkat *Employment-to-Population Ratio* (EPR) di Indonesia pada periode Februari 2024 hingga Februari 2025 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada Februari 2024, EPR total tercatat sebesar 64,11 persen dan meningkat pada Agustus 2024 menjadi 65,78 persen. Kenaikan ini menggambarkan

peningkatan penyerapan tenaga kerja pada pertengahan tahun, yang umumnya dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi musiman. Namun, pada Februari 2025, EPR total kembali menurun menjadi 64,10 persen. Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit kenaikan di tengah tahun, tingkat EPR total masih menunjukkan kestabilan tanpa perubahan signifikan sepanjang periode tersebut.

### **“EPR laki-laki lebih tinggi Daripada EPR perempuan”**

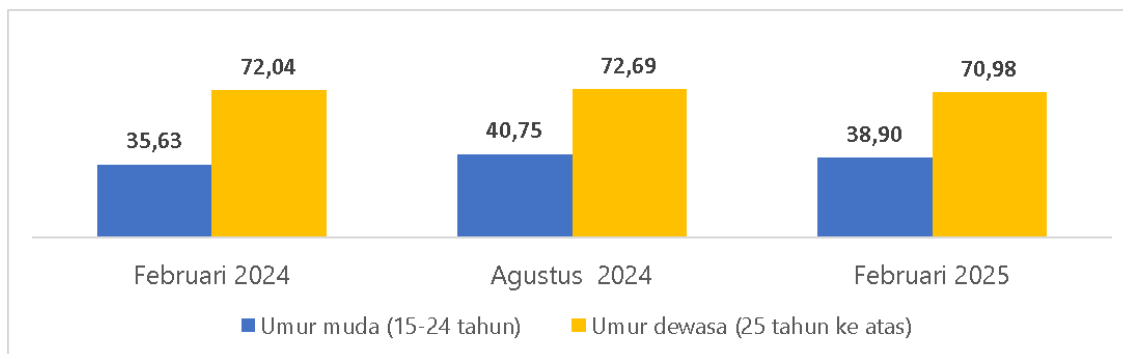


Sumber: Sakernas Februari 2024–Februari 2025

**Gambar 5 *Employment to Population Ratio (EPR)* Menurut Jenis Kelamin, 2024–2025**

Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin seperti yang terlihat pada Gambar 5, tampak bahwa EPR laki-laki lebih tinggi lebih dari 1,7 kali lipat dibandingkan dengan EPR perempuan. Kondisi yang sama terjadi baik pada periode Februari 2024 maupun Agustus 2024. Sebagai gambaran, EPR laki-laki pada Februari 2025 mencapai 81,18 sedangkan EPR perempuan mencapai angka 46,49.

### **“EPR kelompok umur muda lebih rendah dari EPR kelompok umur dewasa”**



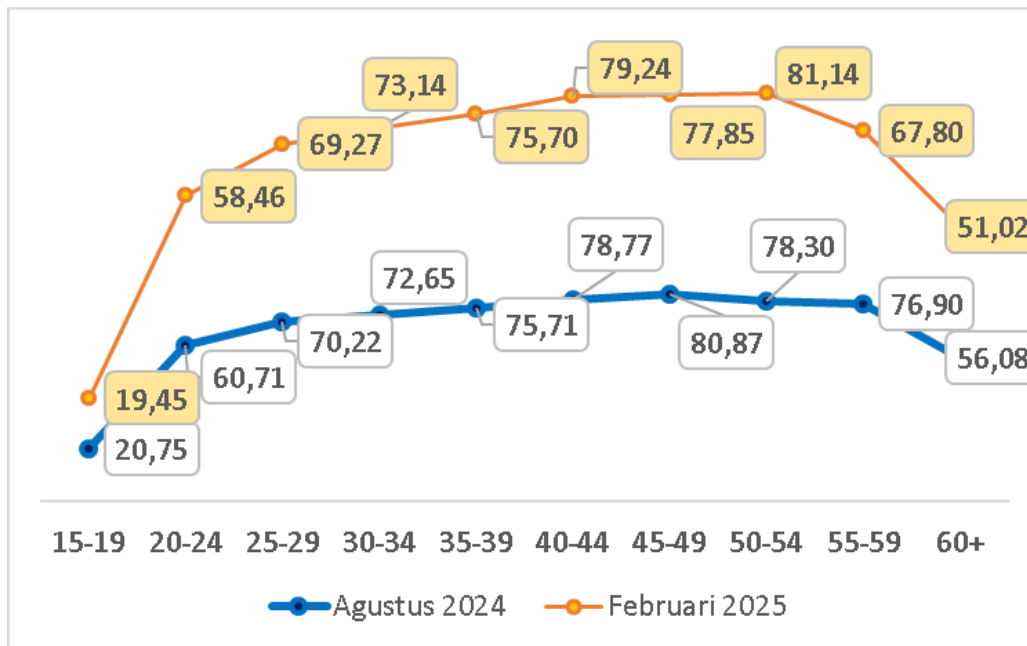
Sumber : Sakernas Februari 2024–Februari 2025

**Gambar 6 *Employment to Population Ratio* Menurut Kelompok Umur, 2024–2025**

Berdasarkan kelompok umur muda (15–24 tahun) dan dewasa (25 tahun ke atas) menunjukkan bahwa EPR kelompok umur muda cenderung lebih rendah daripada kelompok umur dewasa. Dalam hal ini, EPR kelompok umur muda lebih rendah sekitar 32 sampai 36 poin dari EPR pada kelompok umur dewasa. Pada Februari 2025 terjadi kenaikan EPR pada kelompok umur muda sebesar 3,27 poin dibandingkan Februari 2024. Sedangkan EPR pada kelompok umur dewasa mengalami penurunan sebesar 1,06 poin dibandingkan dengan Februari 2024. Hal ini memperlihatkan pergeseran struktur partisipasi angkatan kerja, dimana tenaga kerja kelompok umur muda semakin banyak yang bekerja, sementara proporsi kelompok umur dewasa yang bekerja menurun, atau bisa dianggap bahwa kelompok umur dewasa sedang menghadapi tantangan penyerapan di pasar kerja. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2024, EPR Februari 2025 baik pada kelompok umur muda dan kelompok umur dewasa mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,85 dan 1,71 poin. Kondisi ini mengindikasikan semakin melemahnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja secara umum. Secara keseluruhan, tren penurunan EPR ini mencerminkan tantangan ketenagakerjaan yang semakin luas ke depannya (Gambar 6).

**“Februari 2025 : EPR tertinggi pada kelompok umur 50-54 tahun”**





**Gambar 7 *Employment to Population Ratio* Menurut Kelompok Umur, Agustus 2024 dan Februari 2025**

Pola EPR berdasarkan kelompok umur seperti yang terlihat pada Gambar 7 serupa dengan pola TPAK pada Gambar 3 yang sama-sama mempunyai pola seperti huruf “U” terbalik. Pada Gambar 7 tampak bahwa EPR kelompok umur 15–19 tahun pada Februari 2025 cenderung rendah yaitu sebesar 19,45 jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Dari Gambar 7 juga terlihat bahwa EPR terus mengalami penurunan hingga kelompok umur 25–29 pada Februari 2025, dan meningkat pada kelompok umur 30–34 sebesar 0,50 poin dibandingkan Agustus 2024. EPR mengalami kenaikan terbesar pada kelompok umur 50–54, yakni hingga 2,84 poin dibandingkan Agustus 2024. Kondisi ini menggambarkan adanya pergeseran dinamikan partisipasi tenaga kerja, dimana penduduk usia tua (yang mendekati usia pensiun) justru semakin aktif dalam kegiatan ekonomi, sebaliknya penduduk usia muda dan dewasa justru mengalami penurunan partisipasi kerja. Berikutnya, Gambar 7 juga menunjukkan bahwa EPR periode Agustus 2024 terlihat cenderung mengalami penurunan secara keseluruhan dari 65,78 menjadi 64,10 pada Februari 2025.

Sebagai catatan, meskipun EPR mengalami penurunan, hal ini tidak selalu mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang negatif, fenomena ini juga dapat memiliki sisi positif. Kemungkinan yang mungkin terjadi adalah adanya

peningkatan partisipasi pendidikan untuk kelompok umur muda sebagai imbas dari penurunan EPR yang berpotensi meningkatkan kualitas tenaga kerja di masa depan. Selain itu, sebagian penduduk usia kerja mungkin sedang bertransisi menuju pekerjaan yang lebih baik atau memilih menunda bekerja untuk meningkatkan keterampilan. Dengan demikian, penurunan EPR tidak selalu menunjukkan melemahnya pasar kerja, tetapi juga bisa mencerminkan proses penyesuaian struktural dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sangat diperlukan analisis lebih dalam dan terpadu mengenai indikator ini bersamaan dengan indikator ketenagakerjaan lainnya untuk mengidentifikasi kualitas pasar kerja.

## **KILM 3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

### **“Penduduk bekerja di Indonesia sebagian besar berstatus berusaha”**

Distribusi penduduk bekerja jika dirinci berdasarkan status pekerjaan utama, pada Februari 2025 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan periode Februari 2024 maupun Agustus 2024. Pada Februari 2025, penduduk bekerja didominasi oleh mereka yang berstatus berusaha (39,24 persen). Persentase terbesar berikutnya yaitu buruh/karyawan/pegawai (38,31 persen), pekerja keluarga (12,32 persen) dan urutan terakhir adalah pekerja bebas (10,13 persen).

Selama setahun terakhir (Februari 2024-2025), terjadi penurunan persentase untuk status berusaha sebesar 1,54 persen poin. Sedangkan status pekerja bebas dan buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,41 persen poin dari 9,72 pada Februari 2024 menjadi 10,13 persen pada Februari 2025 dan 5,26 persen poin pada Februari 2025. Untuk status pekerja keluarga juga mengalami penurunan sebesar 4,08 persen poin pada Februari 2025.

**Tabel 1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2024–2025**

Status Pekerjaan Utama	2024		2025
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Buruh/Karyawan/Pegawai</b>	<b>33,05</b>	<b>36,13</b>	<b>38,31</b>
<b>Berusaha</b>	<b>40,78</b>	<b>42,49</b>	<b>39,24</b>
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	6,15	5,52	7,11
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	14,20	13,19	13,91
Berusaha Sendiri	20,43	23,78	18,22
<b>Pekerja Bebas</b>	<b>9,72</b>	<b>8,16</b>	<b>10,13</b>
<b>Pekerja Keluarga</b>	<b>16,40</b>	<b>13,23</b>	<b>12,32</b>
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2025

Pola yang berbeda terjadi selama periode Agustus 2024–Februari 2025, dimana yang mengalami peningkatan persentase adalah status pekerja bebas (naik 1,97 persen poin). Sedangkan untuk status berusaha mengalami penurunan sebesar 3,24 persen poin, yang terdiri atas berusaha dibantu buruh tetap dan berusaha dibantu buruh tidak tetap meskipun masing-masing mengalami kenaikan sebesar 1,60 persen poin dan 0,72 persen poin, namun penduduk dengan status berusaha sendiri mengalami penurunan yang cukup tinggi dibandingkan Agustus 2024, yakni sebesar 5,56 persen poin. Selain itu, penduduk yang berstatus buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 2,18 poin dibanding Agustus 2024, dari 36,13 persen menjadi 38,31 persen pada Februari 2025.

Pembahasan mengenai penduduk yang bekerja dengan status berusaha dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu berusaha dibantu buruh tetap; berusaha dibantu buruh tidak tetap; dan berusaha sendiri. Pada Februari 2025 persentase berusaha dibantu buruh tetap mencapai 7,11 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 13,91 persen poin dan berusaha sendiri sebesar 18,22 persen poin.

Jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu (Februari 2024), kenaikan persentase terdapat pada kategori penduduk bekerja berstatus berusaha dibantu buruh tetap sebesar 0,96 persen poin. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha sendiri masing-masing turun sebesar 0,29 dan 2,21 persen poin.

Pola yang hampir sama juga terjadi pada penduduk berstatus berusaha pada Februari 2025 jika dibandingkan dengan Agustus 2024. Kategori penduduk bekerja berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap justru mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen poin, yakni dari 13,19 pada Agustus 2024 menjadi 13,91 pada Februari 2025. Sedangkan untuk penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami penurunan sebesar 5,56 persen poin pada Februari 2025.

## **KILM 4 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

### **“Mayoritas penduduk bekerja di kategori pertanian, kehutanan dan perikanan”**

Struktur lapangan pekerjaan utama di Indonesia menunjukkan pola yang didominasi oleh pekerjaan pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Kondisi pada Februari 2025 persentase penduduk bekerja pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 42,64 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah kategori perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 17,45 persen dan kategori industri pengolahan sebesar 8,18 persen (Tabel 2).

**Tabel 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama  
(17 Kategori), 2024–2025**

Lapangan Pekerjaan Utama	2024		2025
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,72	43,92	42,64
B. Pertambangan dan Penggalian	4,67	3,77	3,28
C. Industri Pengolahan	8,26	4,87	8,18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,17	0,08
E. <i>Treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, dan aktivitas remediasi	0,07	0,21	0,14
F. Konstruksi	3,44	4,64	2,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran	17,07	16,64	17,45
H. Transportasi dan Pergudangan	3,15	2,98	2,78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,67	5,64	4,42
J. Informasi dan Komunikasi	0,80	0,49	0,43
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	0,95	1,24
L. Real Estat	0,03	0,17	0,07
M,N. Jasa Perusahaan	0,94	1,02	1,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,27	5,33	5,16
P. Jasa Pendidikan	4,98	5,04	6,48
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	1,49	1,81
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,21	2,65	2,63
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

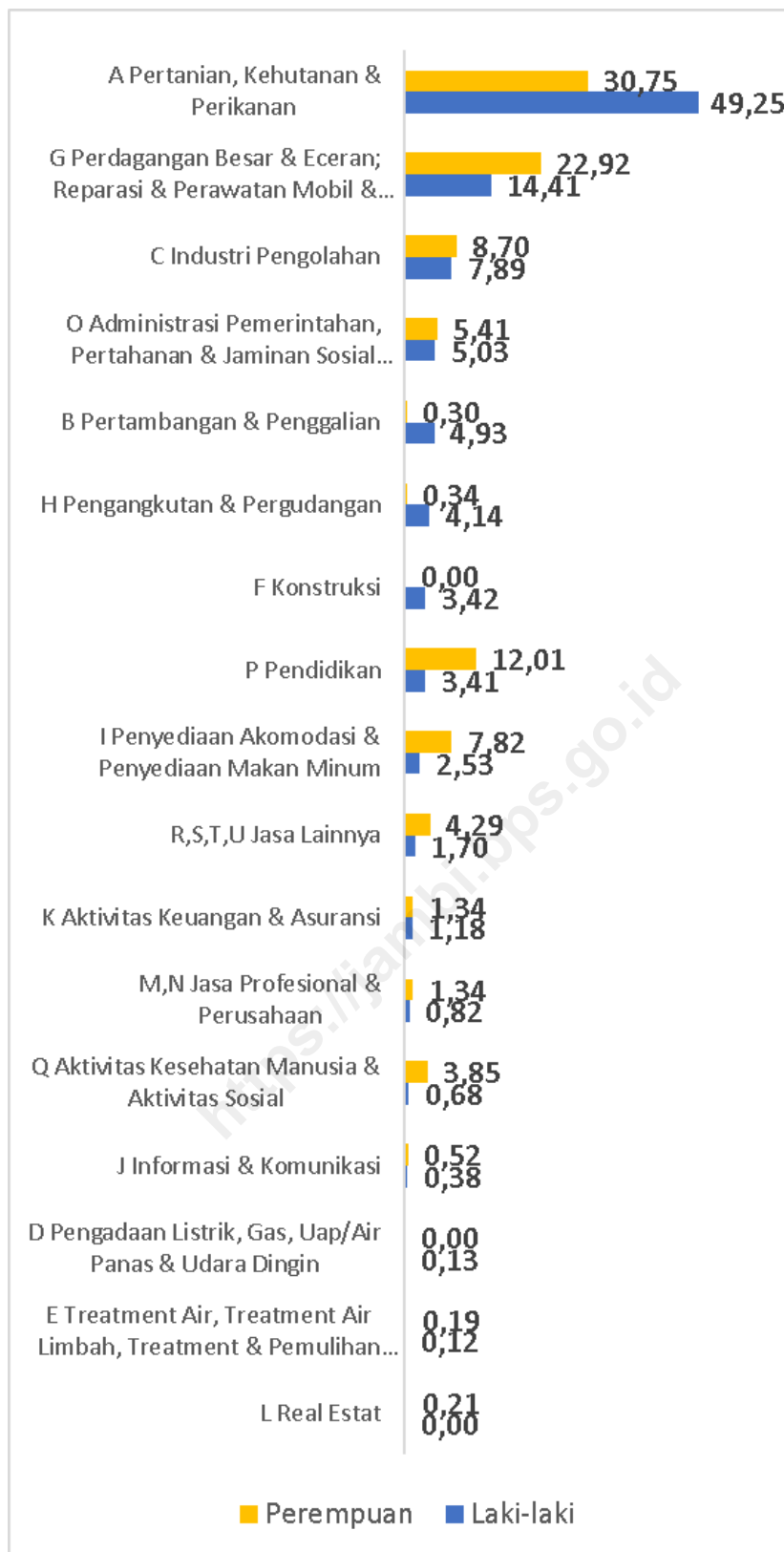
Sumber: Sakernas, Februari 2024–Februari 2025

Perubahan komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan memungkinkan terjadi karena adanya perpindahan sektor, atau bisa juga dikarenakan faktor musiman. Sektor yang mengalami peningkatan paling besar selama periode Februari 2024 hingga Februari 2025 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,92 persen), dan jasa pendidikan (1,50 persen). Sedangkan, sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah pertambangan dan penggalian (1,39 persen), penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (1,25 persen poin) dan konstruksi (1,24 persen). Perubahan komposisi lapangan usaha ini menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja antar sektor ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor Pendidikan

menjadi penyerap tenaga kerja baru selama periode Februari 2025. Hal ini berbarengan dengan adanya pengumuman kelulusan PPPK Guru 2024 Tahap 1 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, yang turut mendorong bertambahnya jumlah tenaga kerja sektor Pendidikan. Sementara itu, sektor pertanian tercatat mengalami kenaikan penyerapan tenaga kerja karena harga komoditas pertanian di Provinsi Jambi yang secara umum mengalami kenaikan selama periode Februari 2025. Fenomena ini menggambarkan bahwa kenaikan harga komoditas pertanian menjadi salah satu faktor pendorong pergeseran tenaga kerja menuju sektor pertanian. Hal ini menunjukkan sektor pertanian kehutanan dan perikanan masih menjadi penopang utama dalam aktivitas ekonomi Provinsi Jambi periode Februari 2025.

Dibandingkan keadaan satu semester yang lalu (kondisi Agustus 2024-Februari 2025), lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama terdapat sektor industri pengolahan (3,31 persen), jasa pendidikan (1,44 persen poin) dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil (0,81 persen). Sementara itu, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada kategori konstruksi (2,44 persen), pertanian, kehutanan dan perikanan (1,28 persen) dan penyediaan akomodasi makan minum (1,22 persen poin). Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor primer seperti pertanian dan konstruksi menuju sektor industri dan jasa, khususnya pendidikan dan perdagangan. Pergeseran tersebut mencerminkan dinamika musiman dan perubahan pola aktivitas ekonomi, di mana sektor industri dan jasa tumbuh lebih cepat dalam periode enam bulan terakhir.

Pada Februari 2025, gap terbesar pada proporsi penduduk bekerja laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan terdapat pada kategori konstruksi, sedangkan gap terbesar pada proporsi penduduk bekerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki berada di kategori perdagangan besar dan eceran. Kondisi Februari 2025 memperlihatkan adanya segregasi lapangan pekerjaan



Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

**Gambar 8 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2025**

Berdasarkan jenis kelamin dalam komposisi penduduk yang bekerja. Pada kategori lapangan pekerjaan pertanian; pertambangan; konstruksi; transportasi; real estate; jasa keuangan; pengadaan listrik dan gas; didominasi oleh pekerja laki-laki. Sementara pada kategori lapangan pekerjaan perdagangan, akomodasi dan makan minum; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan jasa lainnya didominasi oleh pekerja perempuan.

Gap terbesar dari proporsi laki-laki yang bekerja berada pada kategori sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,49 persen, kategori perdagangan besar & eceran; reparasi & perawatan mobil & sepeda motor dengan gap sebesar 8,51 persen, pendidikan sebesar 8,60 persen serta penyediaan akomodasi & penyediaan makan minum sebesar 5,29 persen. Kategori lapangan pekerjaan perdagangan; jasa pendidikan; penyediaan akomodasi makan dan minum; serta jasa aktivitas kesehatan didominasi oleh perempuan. Gap terbesar dari proporsi perempuan yang bekerja berada pada kategori jasa Pendidikan sebesar 8,60 persen, perdagangan sebesar 8,51 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,29 persen. Berikutnya, pada kategori jasa kesehatan sebesar 3,18 persen.

Lapangan pekerjaan penduduk perempuan di Provinsi Jambi terkonsentrasi pada sektor jasa, seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (30,75 persen), perdagangan (22,92 persen), dan jasa pendidikan (12,01 persen). Hal ini sejalan dengan data ILO bahwa dalam skala global, perempuan paling banyak menggeluti bidang jasa, terutama yang berupah rendah dengan waktu bekerja yang fleksibel sehingga memudahkan mereka untuk menyeimbangkan waktu mengurus keluarga dan waktu untuk bekerja (ILO, 2016).



## KILM 5 Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Statistik jenis pekerjaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tingkat keahlian tenaga kerja. Selain itu, proyeksi jenis pekerjaan seringkali dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan terutama untuk merumuskan standar ketenagakerjaan internasional dalam upaya memenuhi tujuan menciptakan pekerjaan yang layak dan melindungi hak-hak pekerja di berbagai sektor (ILO, 2016).

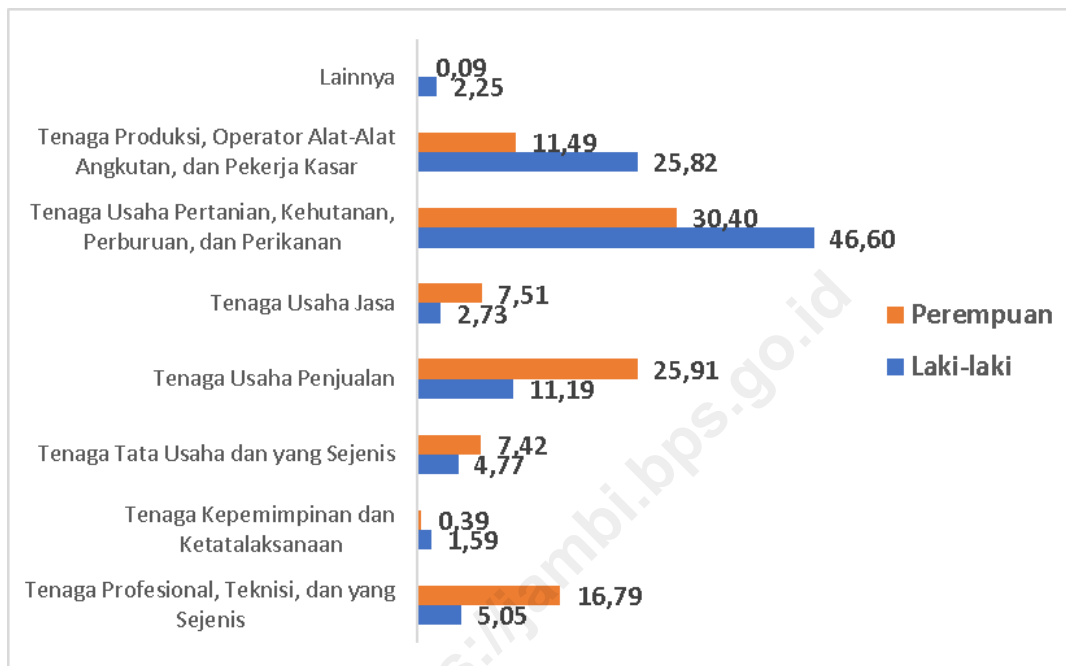
Pada Februari 2025, jenis pekerjaan di Provinsi Jambi didominasi tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan (40,81 persen), tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar (20,70 persen), dan tenaga usaha penjualan (16,45 persen). Struktur jenis pekerjaan selama Februari 2024 hingga Agustus 2024 cenderung memiliki pola yang sama.

**Tabel 3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, 2024–2025**

Jenis Pekerjaan Utama	2024		2025
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis	6,16	6,50	9,24
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1,18	0,93	1,16
Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	5,70	5,95	5,71
Tenaga Usaha Penjualan	17,97	18,53	16,45
Tenaga Usaha Jasa	5,15	4,46	4,44
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	37,17	41,85	40,81
Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar	25,18	20,48	20,70
Lainnya	1,49	1,30	1,48
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sakernas, Februari 2024-Februari 2025

Berdasarkan jenis kelamin, jenis pekerjaan penduduk laki-laki terkonsentrasi pada tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan (46,60 persen), serta tenaga produksi dan operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar (25,82 persen). Sedangkan, jenis pekerjaan penduduk perempuan terkonsentrasi pada tenaga usaha jasa penjualan (25,91 persen), tenaga profesional, teknis dan yang sejenis (16,79 persen), dan tenaga usaha jasa (7,51 persen).



Sumber: Sakernas Februari 2024–Februari 2025

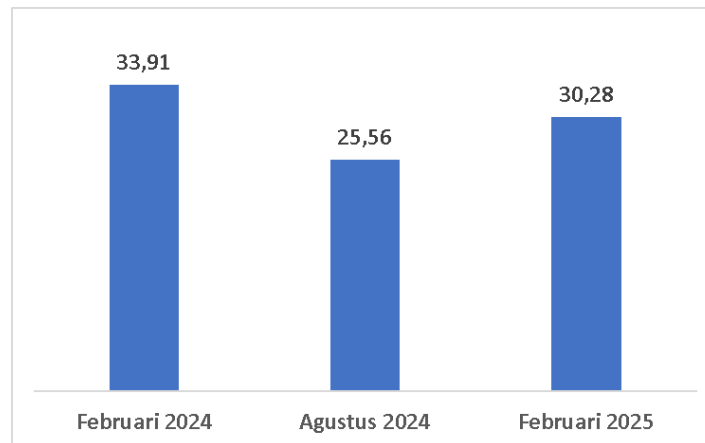
**Gambar 9 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari 2025**

## KILM 6 Pekerja Paruh Waktu

Pekerja paruh waktu adalah pekerja dengan jumlah jam kerja di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Walaupun jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu, mereka tidak sedang mencari dan mempersiapkan usaha. Selain itu, pekerja paruh waktu juga tidak bersedia jika ada yang menawarkan pekerjaan lain.

Pekerjaan paruh waktu memungkinkan keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu untuk keluarga. Pekerjaan ini juga memungkinkan lebih banyak

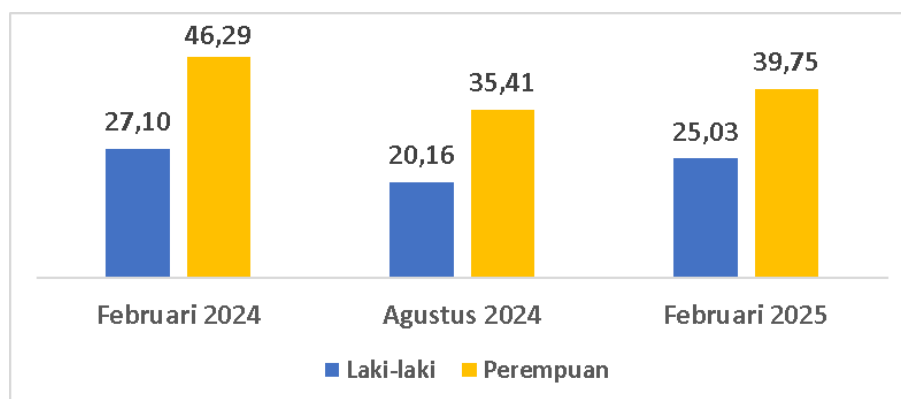
penduduk usia kerja untuk terjun dalam pasar tenaga kerja. Namun, pekerja paruh waktu seringkali mendapatkan upah lebih rendah, prospek karir yang terbatas, dan pekerjaan yang kurang stabil (ILO, 2016).



Sumber: Sakernas Februari 2024–Februari 2025

**Gambar 10 Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2024–2025**

Pada Februari 2025, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 30,28 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk yang bekerja, terdapat sekitar 30-31 orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan tidak punya keinginan untuk menambah pekerjaan. Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2025 meningkat 4,73 persen poin dibandingkan Agustus 2024 dan menurun sebesar 3,62 persen poin dibandingkan Februari 2024.



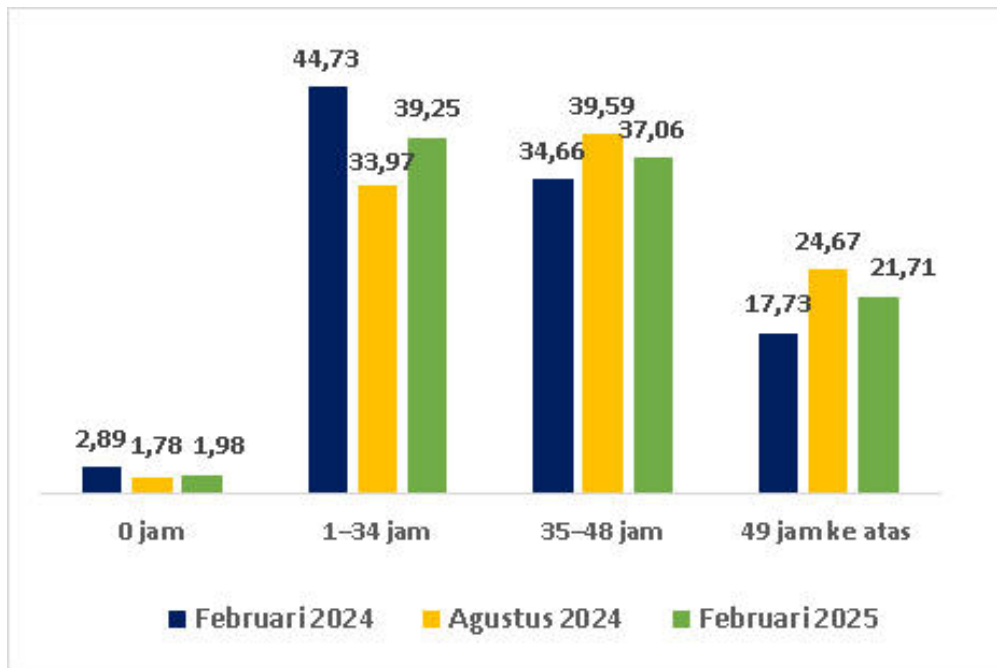
Sumber: Sakernas Februari 2024–Februari 2025

**Gambar 11 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024–2025**

Pada Februari 2025, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki tercatat 1,6 kali lebih rendah dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 25,03 persen dan 39,75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan untuk berpartisipasi penuh di pasar kerja karena adanya tanggung jawab ganda, terutama dalam mengurus rumah tangga dan keluarga. Akibatnya, banyak perempuan memilih pekerjaan dengan jam kerja yang lebih fleksibel agar dapat menyeimbangkan antara peran domestik dan peran profesional. Fenomena ini mencerminkan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih ramah terhadap perempuan, seperti penyediaan fasilitas penitipan anak dan peluang kerja fleksibel, guna mendorong kesetaraan gender di dunia kerja. Hal ini sejalan dengan temuan dalam laporan *"Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work"* (ILO, 2018), yang menyebutkan bahwa perempuan menghabiskan waktu jauh lebih banyak untuk pekerjaan domestik dan perawatan dibandingkan laki-laki, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk bekerja penuh waktu atau mempertahankan pekerjaan dengan jam kerja reguler.

## **KILM 7 Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja**

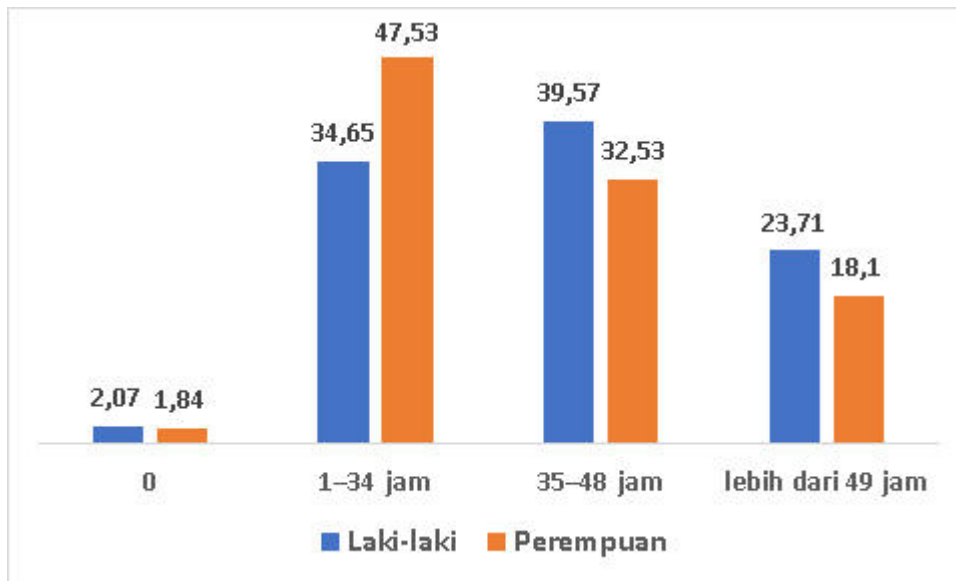
Jam kerja berhubungan secara langsung dengan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jam kerja yang kurang menunjukkan kemampuan pekerja belum dimanfaatkan secara optimal dan pendapatan yang diterima pekerja tidak maksimal jika ia dibayar berdasarkan lamanya bekerja. Sedangkan, jam kerja yang berlebih dapat mengganggu kehidupan pribadi dan hubungan dengan keluarga (BPS, 2022).



Sumber: Sakernas Februari 2024–Februari 2025

**Gambar 12 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2024–2025**

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, hampir separuh penduduk Provinsi Jambi bekerja antara 1–34 jam per minggu sebesar 39,25 persen. Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan jam kerja normal (35–48 jam) tercatat sebesar 37,06 persen. Di sisi lain, hampir 1 dari 5 penduduk (21,7 persen) bekerja dengan jam kerja lebih dari 48 jam per minggu. Jam kerja tersebut telah melebihi batas maksimum yang direkomendasikan oleh ILO, yaitu 48 jam per minggu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi jam kerja, di mana sebagian pekerja belum mendapatkan jam kerja optimal, sementara sebagian lainnya justru bekerja secara berlebihan. Jam kerja yang terlalu panjang dapat menimbulkan kelelahan, menurunkan produktivitas, dan berpotensi berdampak negatif terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi pekerja..

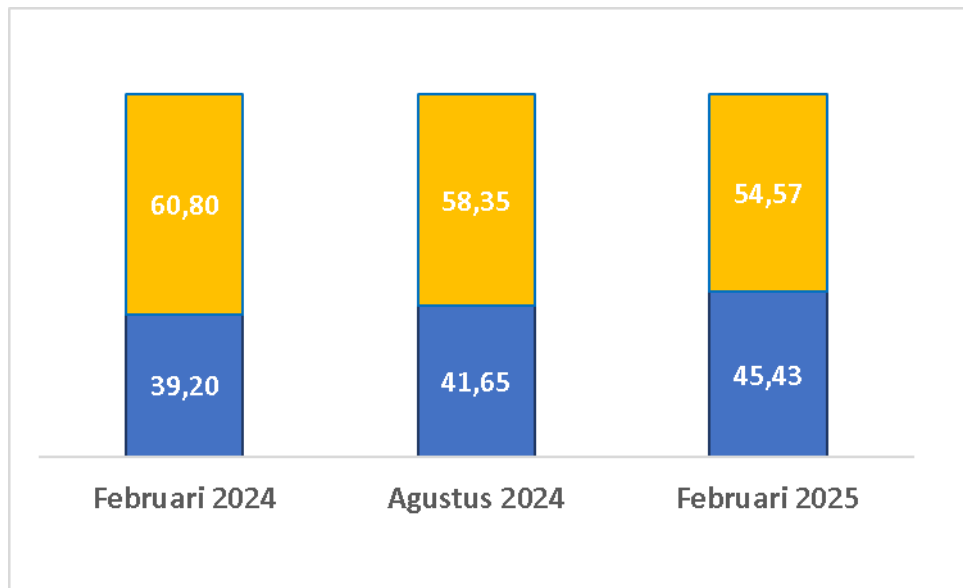


**Gambar 13 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Februari 2025**

Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara pola jam kerja laki-laki dan jam kerja perempuan. Mayoritas perempuan bekerja di bawah jam kerja normal (56,38 persen) demikian juga penduduk laki-laki terkonsentrasi pada jam kerja normal (38,99 persen). Perempuan pada umumnya harus membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangga, sehingga jam kerja mereka di bawah jam kerja normal.

## KILM 8 Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, pada umumnya, kondisi pekerjaan sektor informal kurang layak, tidak memiliki sistem jaminan sosial, banyak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan.



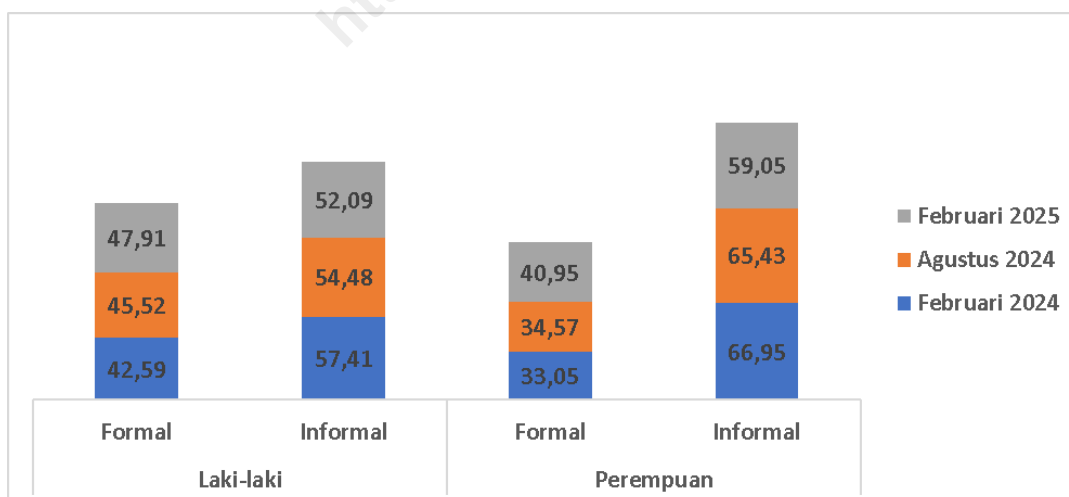
Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

**Gambar 14 Persentase Penduduk Bekerja pada Kegiatan Formal/Informal, 2024–2025**

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan utama. Penduduk bekerja di kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk penduduk bekerja di kegiatan informal. Berdasarkan Sakernas Februari 2025, sebesar 54,57 persen penduduk bekerja di Provinsi Jambi bekerja pada kegiatan informal. Persentase ini mengalami penurunan sebesar 3,78 persen poin dari Agustus 2024.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan lebih cenderung bekerja pada kegiatan informal dibandingkan laki-laki. Pada Februari 2025, persentase penduduk laki-laki bekerja di kegiatan informal tercatat sebesar 52,09 persen, sedangkan pada perempuan mencapai 59,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih lebih banyak terserap di sektor pekerjaan yang tidak memiliki perlindungan dan jaminan kerja yang memadai. Meskipun demikian, baik pada tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, terjadi penurunan penyerapan

tenaga kerja di sektor informal selama periode Februari 2024 hingga Februari 2025. Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja di kegiatan formal justru menunjukkan peningkatan pada periode yang sama, menandakan adanya pergeseran positif menuju struktur ketenagakerjaan yang lebih terlindungi dan produktif. Perkembangan ini menggambarkan adanya arah perbaikan dalam kualitas ketenagakerjaan di Indonesia, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan gender dan memperluas kesempatan kerja formal yang setara bagi seluruh kelompok penduduk. Peningkatan partisipasi di sektor formal juga menunjukkan mulai membaiknya daya serap pasar kerja dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan. Ke depan, penguatan pelatihan keterampilan dan kebijakan perlindungan sosial menjadi kunci penting untuk memastikan seluruh pekerja memperoleh akses yang adil terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan laporan ILO (2023) dalam *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*, yang menyatakan bahwa perempuan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih lebih rentan bekerja di sektor informal dengan tingkat perlindungan sosial yang rendah, sehingga diperlukan strategi nasional untuk mendorong transisi menuju pekerjaan formal yang inklusif dan berkeadilan gender.



Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

**Gambar 15 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2024–2025**



# 3 INDIKATOR PENGANGGURAN

TPT Tertinggi hasil  
Sakernas Februari 2025  
terdapat pada pendidikan  
SMA (7,42 persen)

<https://jambi.bps.go.id>





# BAB 3

## INDIKATOR PENGANGGURAN

### KILM 9 Pengangguran

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran. Indikator TPT dapat digunakan sebagai acuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru. Selain itu, indikator ini seringkali menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan selain angka kemiskinan (BPS, 2022).

**Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2024–2025**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2024		2025
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	4,39	2,68	4,98
Perempuan	4,56	7,62	3,58
<b>Total</b>	4,45	4,48	4,48

Sumber: Sakernas, Februari 2024–Februari 2025

Berdasarkan data Sakernas Februari 2025, TPT di Provinsi Jambi mencapai 4,48 persen. Dengan kata lain, dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Jambi, terdapat 4 sampai 5 penduduk yang menganggur. Persentase ini naik 0,03 persen poin dari Februari 2024 dan jika dibandingkan dengan Agustus 2024 TPT Februari 2025 cenderung stabil, yaitu sebesar 4,48 persen. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya penyerapan tenaga kerja yang proporsional selama periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 dan kondisi pasar kerja yang cenderung stabil. Meskipun secara total tidak terdapat perubahan persentase TPT, namun jika dilihat per jenis kelamin, ada perubahan yang cenderung signifikan.

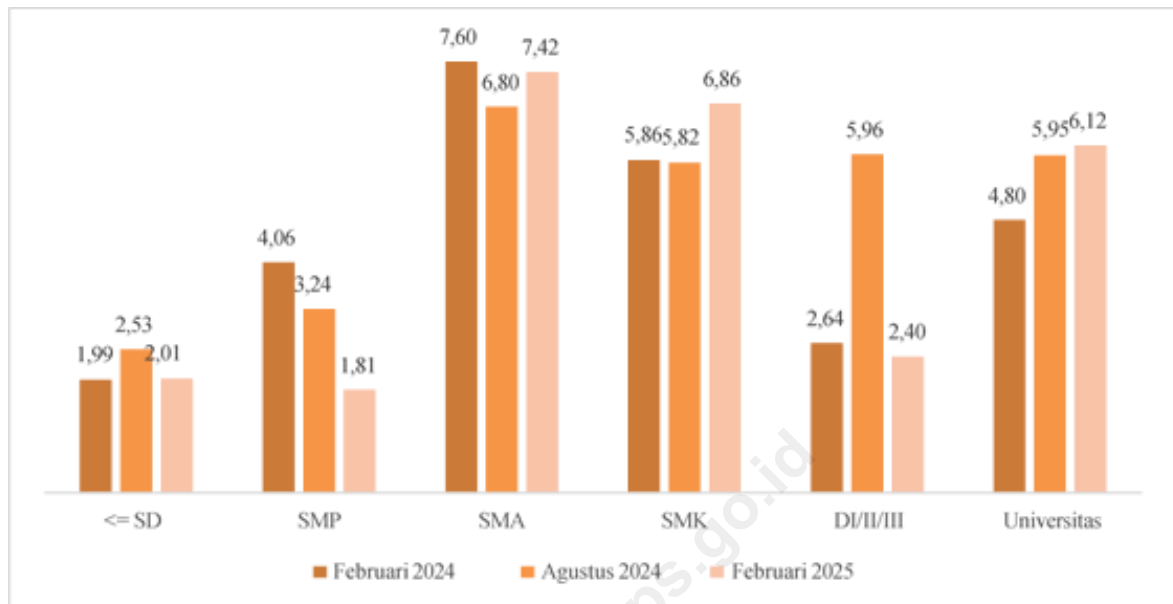
Meskipun dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, TPT yang rendah dapat menyamarkan kemiskinan. Jika suatu daerah tidak memiliki jaring pengaman untuk pengangguran, banyak penduduk akan terpaksa bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, pekerjaan yang mereka dapatkan tergolong tidak layak, misalnya jam kerja kurang, upah rendah, dan produktivitas rendah (ILO, 2016). Sehingga, meskipun TPT sudah termasuk rendah, perlu dilihat kembali lapangan usaha, sektor pekerjaan, upah, dan jam kerja dari penduduk yang bekerja.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada periode Februari dan Agustus 2024 TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Sedangkan pada Februari 2025, TPT Perempuan lebih rendah dibanding TPT laki-laki. Sebagai gambaran, pada Februari 2025, TPT laki-laki mencapai 4,98 persen sedangkan TPT perempuan mencapai 3,58 persen. Dari Tabel 4 terlihat bahwa penduduk laki-laki mengalami kenaikan TPT hingga 2,30 persen poin, dari 2,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 4,98 persen di Februari 2025. Sedangkan TPT penduduk perempuan mengalami penurunan sebesar 4,04 persen poin pada Februari 2025. TPT perempuan lebih rendah dapat disebabkan karena laki-laki lebih banyak yang masuk dalam angkatan kerja dan aktif mencari pekerjaan. Selain itu, bisa juga terjadi karena laki-laki lebih banyak berada pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi misalnya konstruksi dan pertambangan penggalian yang berakibat akan lebih mudah terdampak ketika ada penurunan permintaan tenaga kerja. TPT juga sering berbeda menurut jenis kelamin karena perbedaan partisipasi di pasar tenaga kerja, segregasi pekerjaan dan norma sosial (ILO, 2019).

### **Pengangguran dan Pendidikan**

Jika diamati menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode Februari 2024 hingga Februari 2025, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan antarjenjang pendidikan. Pada Februari 2024, TPT tertinggi tercatat pada lulusan SMA sebesar 7,60%, diikuti oleh SMK (5,86%) dan Universitas (4,80%),

sedangkan tingkat pengangguran terendah terdapat pada lulusan  $\leq$ SD (1,99%). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pendidikan menengah atau tinggi, belum semua lulusan mampu terserap dengan baik di pasar kerja.



Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

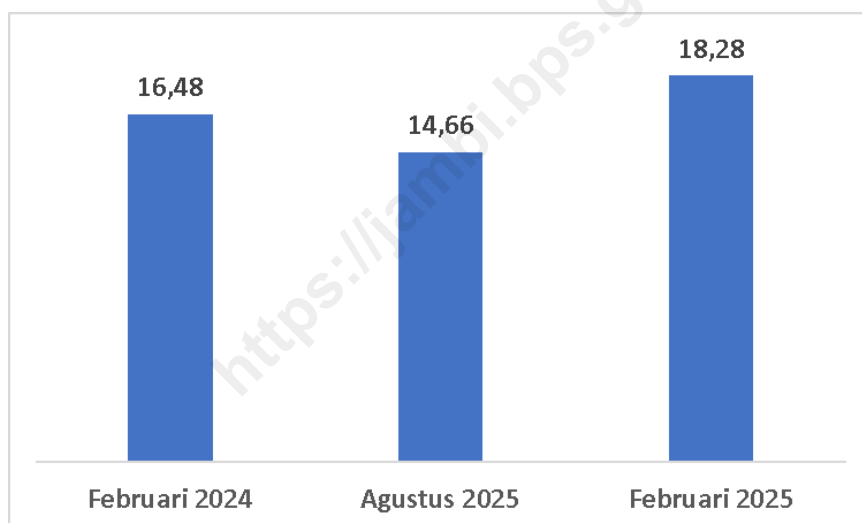
### Gambar 16 TPT Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024–2025

Memasuki Agustus 2024, sebagian besar jenjang pendidikan mengalami penurunan tingkat pengangguran, terutama pada SMA (6,80 persen) dan SMK (5,82 persen). Namun, lulusan Diploma dan Universitas justru mengalami peningkatan menjadi masing-masing 5,96 persen dan 6,95 persen, yang mengindikasikan bahwa persaingan antar lulusan pendidikan tinggi semakin ketat. Pada Februari 2025, TPT kembali meningkat pada beberapa jenjang, khususnya SMA (7,42 persen), SMK (6,86 persen), dan Universitas (6,12 persen), sementara kelompok  $\leq$ SD (2,01 persen) dan SMP (1,81 persen) justru mengalami penurunan. Tren ini menunjukkan bahwa pengangguran masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan tinggi, yang menandakan masih adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. Secara keseluruhan, peningkatan TPT di kalangan berpendidikan tinggi

menunjukkan perlunya peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan agar lebih sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

## KILM 10 Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

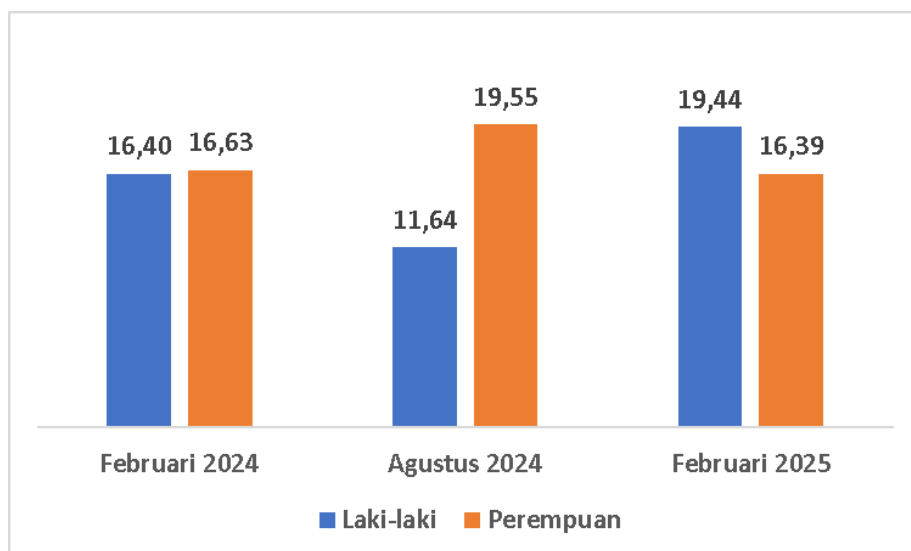
Indikator ini mencerminkan sejauh mana penduduk umur muda bersedia untuk mencari pekerjaan dan/atau mempersiapkan usaha dalam kegiatan ekonomi. Sudah menjadi hal umum bahwa kebanyakan pemuda memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman kerja, sehingga hal ini juga berimbas pada kecilnya kesempatan kerja dan tingginya pengangguran pada kelompok ini. Dalam indikator ini, umur muda mencakup penduduk yang berusia 15 sampai 24 tahun, sedangkan umur dewasa mencakup penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.



Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

### Gambar 17 TPT Penduduk Umur Muda (persen), 2024–2025

Pada Februari 2025, TPT kelompok umur muda di Provinsi Jambi mencapai 18,28 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 18 orang yang menganggur. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,8 persen poin dibandingkan Februari 2024 dan selisih 3,62 persen poin lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024.



Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

**Gambar 18 TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), 2024–2025**

Gambar 18 menunjukkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk umur muda menurut jenis kelamin pada periode Februari 2024 hingga Februari 2025. Secara umum, terlihat bahwa tingkat pengangguran pemuda mengalami fluktuasi cukup signifikan sepanjang periode tersebut. Pada Februari 2024, baik laki-laki maupun perempuan memiliki TPT yang hampir sama, masing-masing sekitar 16 persen. Namun pada Agustus 2024, terjadi penurunan tajam pada laki-laki hingga 11,64 persen, sementara perempuan justru meningkat tajam menjadi 19,55 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan muda menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan pada pertengahan tahun tersebut.

Memasuki Februari 2025, arah perubahan berbalik: TPT laki-laki meningkat menjadi 19,44 persen, sedangkan perempuan menurun menjadi 16,39 persen. Pergeseran ini menunjukkan dinamika pasar kerja yang sangat cepat bagi penduduk usia muda, di mana kondisi ekonomi, musim rekrutmen, serta perbedaan sektor pekerjaan dapat memengaruhi tingkat pengangguran masing-masing kelompok gender.

Simpulannya, pengangguran di kalangan muda masih menunjukkan kerentanan yang tinggi, terutama karena keterbatasan pengalaman kerja dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Laporan ILO (2023) juga

menegaskan bahwa kelompok usia muda di berbagai negara berisiko lebih tinggi mengalami pengangguran dibandingkan kelompok usia dewasa. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap pelatihan vokasi, pengembangan keterampilan digital, dan penciptaan lapangan kerja layak menjadi strategi penting untuk memperkuat partisipasi pemuda di pasar kerja dan mengurangi kesenjangan antar gender.

**Tabel 5 Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Umur Dewasa di Provinsi Jambi, 2024–2025**

Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Umur Dewasa	2024		2025
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(3)	(4)	
Laki-Laki	6,75	10,18	7,74
Perempuan	6,23	3,62	15,25
<b>Total</b>	6,55	5,45	9,10

Sumber: Sakernas, Februari 2024–Februari 2025

Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk umur muda terhadap TPT penduduk umur dewasa mengalami fluktuasi sepanjang periode Februari 2024 hingga Februari 2025. Pada Februari 2024, rasio TPT pemuda terhadap dewasa tercatat sebesar 6,75 untuk laki-laki, 6,23 untuk perempuan, dan 6,55 secara total. Artinya, tingkat pengangguran muda saat itu sekitar enam kali lebih tinggi dibandingkan pengangguran usia dewasa. Namun, pada Agustus 2024, terjadi pergeseran yang cukup menarik, yaitu rasio laki-laki meningkat tajam menjadi 10,18, sedangkan perempuan menurun signifikan menjadi 3,62.

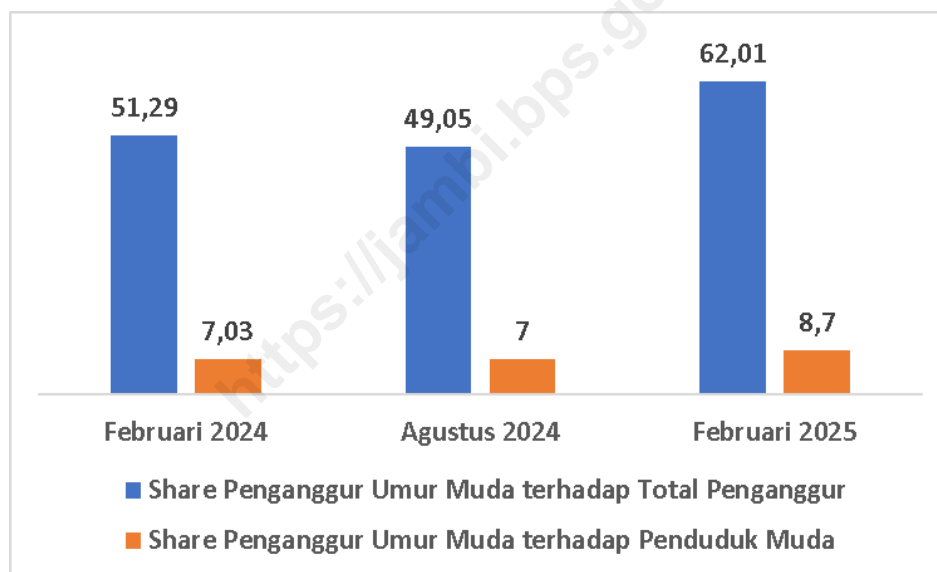
Memasuki Februari 2025, kondisi berbalik drastis. Rasio TPT pemuda perempuan melonjak tinggi menjadi 15,25, jauh melampaui laki-laki yang berada di angka 7,74. Secara total, rasio TPT pemuda terhadap dewasa meningkat menjadi 9,10. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025, kesenjangan pengangguran antara penduduk muda dan dewasa semakin melebar, terutama di kalangan perempuan muda yang menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan.

Pada periode Februari 2024 hingga Februari 2025, proporsi pengangguran usia muda menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada Februari 2024, penduduk muda menyumbang 51,29 persen dari total pengangguran nasional, dan sekitar 7,03 persen dari



total penduduk usia muda tergolong penganggur. Kondisi ini sempat menurun pada Agustus 2024, dengan penurunan menjadi 49,05 persen dan 7,00 persen. Namun, pada Februari 2025, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana share penganggur muda terhadap total pengangguran mencapai 62,01 persen, sementara terhadap penduduk muda naik menjadi 8,70 persen.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa pengangguran semakin terkonsentrasi pada kelompok usia muda, menandakan adanya tantangan besar dalam transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Fenomena ini sejalan dengan temuan ILO (2023) yang menyebutkan bahwa pengangguran pemuda banyak disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan (*skills mismatch*) dan terbatasnya lapangan kerja yang layak. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pelatihan vokasi, penguatan kerja sama pendidikan dan industri, serta penciptaan lapangan kerja produktif bagi generasi muda.



Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

**Gambar 19 *Share* Penganggur Umur Muda (persen), 2024–2025**

## **KILM 12 Setengah Pengangguran (*Underemployment*)**

Tingkat pengangguran yang rendah tidak selamanya menunjukkan proses penyerapan tenaga kerja yang efektif. Tingkat pengangguran yang rendah dapat menyamarkan fakta bahwa cukup banyak pekerja yang masih bekerja di bawah jam

kerja normal, berpenghasilan rendah, dan tidak menggunakan kemampuan mereka secara optimal (ILO, 2016). Indikator setengah pengangguran dapat membantu untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait situasi pasar tenaga kerja yang sebenarnya.

Setengah pengangguran dapat didefinisikan sebagai mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

1. Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
  - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang; dan
  - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaan yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

**Tabel 6 Penduduk Bekerja yang Termasuk Setengah Penganggur, 2024–2025**

Setengah Penganggur (1)	2024		2025
	Februari (3)	Agustus (4)	Februari
Laki-Laki	147.898	100.937	111.335
Perempuan	43.954	53.528	50.248
<b>Total</b>	<b>191.852</b>	<b>154.465</b>	<b>161.583</b>

Sumber: Sakernas, Februari 2023-Februari 2024

Pada Februari 2024, jumlah setengah penganggur laki-laki tercatat sebanyak 147.898 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berjumlah 43.954 orang. Pada Agustus 2024, jumlah setengah penganggur laki-laki menurun cukup signifikan menjadi 100.937 orang, sedangkan perempuan justru meningkat menjadi 53.528 orang.

Memasuki Februari 2025, jumlah setengah penganggur laki-laki kembali naik menjadi 111.335 orang, sementara perempuan sedikit menurun menjadi

50.248 orang. Pola ini menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih banyak berada dalam kondisi setengah menganggur dibandingkan perempuan, meskipun fluktuasi terjadi pada kedua kelompok. Secara umum, perubahan ini menggambarkan adanya dinamika dalam kualitas penyerapan tenaga kerja, di mana sebagian pekerja belum sepenuhnya memperoleh jam kerja optimal atau pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas mereka.

**Tabel 7 Indikator Setengah Penganggur (persen), 2024–2025**

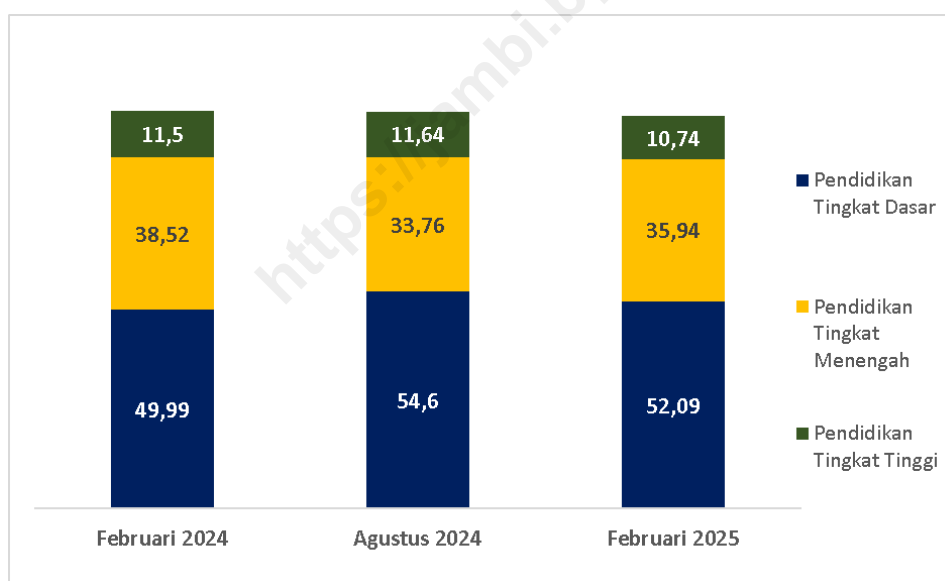
Setengah Penganggur	2024		2025
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(3)	(4)	
<b>Share Setengah Penganggur Terhadap Total Angkatan Kerja</b>	<b>10,34</b>	<b>8,048</b>	<b>8,58</b>
Laki-Laki	12,36	8,29	9,14
Perempuan	6,67	7,62	7,54
<b>Tingkat Setengah Penganggur</b>	<b>10,82</b>	<b>8,43</b>	<b>8,98</b>
Laki-Laki	12,92	8,52	9,62
Perempuan	6,99	8,25	7,82

Sumber: Sakernas, Februari 2024–Februari 2025

Selama periode Februari 2024 hingga Februari 2025, kondisi setengah pengangguran di Indonesia menunjukkan tren yang berfluktuasi. Secara keseluruhan, share setengah penganggur terhadap total angkatan kerja turun dari 10,34 persen pada Februari 2024 menjadi 8,05 persen pada Agustus 2024, kemudian sedikit meningkat menjadi 8,58 persen pada Februari 2025. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki cenderung memiliki proporsi setengah penganggur yang lebih tinggi dibanding perempuan. Pada Februari 2024, persentase setengah penganggur laki-laki tercatat sebesar 12,36 persen dan menurun menjadi 8,29 persen pada Agustus 2024, lalu naik ke 9,14 persen pada Februari 2025. Sementara itu, perempuan menunjukkan fluktuasi yang lebih stabil, dari 6,67 persen menjadi 7,62 persen, lalu sedikit menurun ke 7,54 persen. Pola serupa juga terlihat pada

tingkat setengah penganggur, yang secara total menurun dari 10,82 persen menjadi 8,43 persen, kemudian meningkat tipis menjadi 8,98 persen.

Secara umum, perubahan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas ketenagakerjaan dengan berkurangnya proporsi pekerja yang belum bekerja penuh, meskipun pada awal 2025 terjadi sedikit peningkatan. Laki-laki yang lebih dominan sebagai setengah penganggur menunjukkan kecenderungan bekerja di sektor dengan jam kerja tidak tetap, seperti pertanian dan kegiatan informal. Hal ini sejalan dengan temuan ILO (2023) yang menegaskan bahwa pekerja informal lebih rentan terhadap jam kerja tidak penuh dan ketidakpastian penghasilan. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap pekerjaan layak dan perluasan sektor formal menjadi langkah penting dalam mendorong stabilitas dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia.



Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

**Gambar 20 Distribusi Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2024–2025**

Data menunjukkan komposisi penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan selama periode Februari 2024 hingga Agustus 2025. Kelompok dengan pendidikan tingkat dasar masih mendominasi, meskipun mengalami fluktuasi. Pada Februari 2024, persentasenya tercatat sebesar 49,99 persen, meningkat menjadi 54,6 persen pada Agustus 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 52,09 persen pada Agustus 2025. Sementara itu, penduduk dengan pendidikan tingkat menengah menunjukkan tren sebaliknya — menurun dari 38,52 persen pada Februari 2024 menjadi 33,76 persen pada Agustus 2024, lalu meningkat kembali menjadi 35,94 persen pada Agustus 2025. Untuk kelompok berpendidikan tinggi, proporsinya relatif stabil namun sedikit menurun dari 11,5 persen menjadi 10,74 persen sepanjang periode tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan dasar, menandakan bahwa struktur ketenagakerjaan nasional masih bergantung pada sektor-sektor dengan kebutuhan keterampilan rendah hingga menengah. Penurunan porsi tenaga kerja berpendidikan tinggi juga mengindikasikan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja terdidik di pasar kerja.



# 4 INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA

Pada Februari 2025  
tingkat ketidakaktifan di  
Provinsi Jambi mencapai  
32,89 persen

<https://jambi.bps.go.id>







## BAB 4

# INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA

### KILM 13 Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan merupakan persentase penduduk yang termasuk kategori bukan angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Tingkat ketidakaktifan merupakan kebalikan dari TPAK. Sehingga, semakin rendah tingkat ketidakaktifan, semakin tinggi TPAK yang berarti semakin banyak pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Pada Februari 2025, tingkat ketidakaktifan di Provinsi Jambi mencapai 32,89 persen. Dengan kata lain, dari 100 orang penduduk usia kerja di Provinsi Jambi, sekitar 32 penduduk di antaranya tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan cenderung stagnan pada kisaran di atas 30 persen selama periode Februari 2024 hingga Februari 2025.

**Tabel 8 Tingkat Ketidakaktifan (persen), 2022–2025**

Tingkat Ketidakaktifan	2024		2025
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(3)	(4)	(4)
Laki-Laki	14,84	13,96	14,57
Perempuan	51,57	48,83	51,78
<b>Total</b>	<b>32,91</b>	<b>31,13</b>	<b>32,89</b>

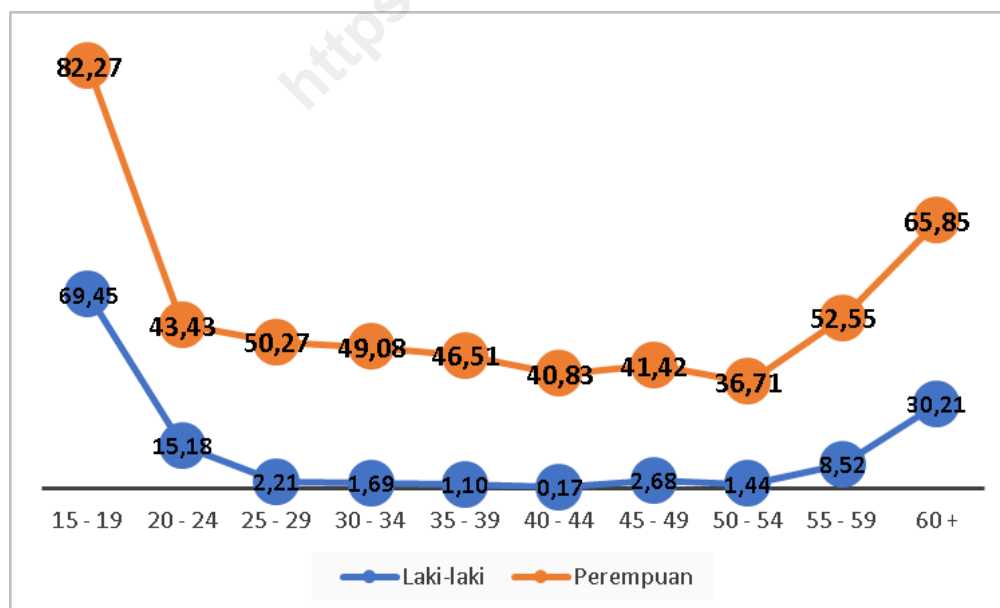
Sumber: Sakernas, Februari 2024–Februari 2025

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat ketidakaktifan perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada Februari 2024, ketidakaktifan perempuan mencapai 51,57 persen, turun menjadi 48,83 persen pada Agustus 2024, kemudian

meningkat lagi ke 51,78 persen pada Februari 2025. Sebaliknya, laki-laki menunjukkan tingkat ketidakaktifan yang jauh lebih rendah, yakni 14,84 persen pada Februari 2024, sedikit menurun menjadi 13,96 persen di Agustus 2024, lalu naik ke 14,57 persen pada Februari 2025.

Perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tidak aktif secara ekonomi masih didominasi oleh perempuan. Hal ini dapat dikaitkan dengan peran domestik yang lebih besar dipegang perempuan, seperti mengurus rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja dan pelatihan. Meskipun sempat terjadi penurunan pada pertengahan 2024, kenaikan kembali pada awal 2025 menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam partisipasi perempuan di pasar kerja.

Berdasarkan kelompok umur, tingkat ketidakaktifan menunjukkan pola seperti huruf "U". Tingkat ketidakaktifan tinggi pada penduduk umur muda kemudian menurun perlahan dan mencapai titik terendahnya pada umur 35-54 tahun. Setelah melalui umur tersebut, tingkat ketidakaktifan kembali meningkat seiring dengan peningkatan umur.



Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

**Gambar 21 Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari 2025**

Data ketidakaktifan penduduk pada Februari 2025 menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dan perempuan di berbagai kelompok umur. Pada kelompok usia muda 15–19 tahun, tingkat ketidakaktifan mencapai angka tertinggi baik pada laki-laki (69,45 persen) maupun perempuan (82,27 persen), yang sebagian besar disebabkan karena mereka masih bersekolah atau menempuh pendidikan. Setelah memasuki usia produktif (20–54 tahun), tingkat ketidakaktifan laki-laki menurun tajam, dengan angka terendah pada kelompok usia 40–44 tahun sebesar 0,17 persen. Sebaliknya, perempuan pada rentang usia produktif masih menunjukkan tingkat ketidakaktifan yang cukup tinggi, berkisar antara 36–50 persen, mencerminkan keterlibatan yang lebih rendah di pasar kerja akibat tanggung jawab domestik dan keterbatasan akses pekerjaan.

Mulai usia 55 tahun ke atas, ketidakaktifan kembali meningkat tajam pada kedua jenis kelamin, terutama pada kelompok usia 60 tahun ke atas, di mana 30,21 persen laki-laki dan 65,85 persen perempuan tergolong tidak aktif secara ekonomi, umumnya karena memasuki masa pensiun atau keterbatasan fisik. Secara total, tingkat ketidakaktifan penduduk pada Februari 2025 mencapai 14,57 persen untuk laki-laki dan 51,78 persen untuk perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih jauh tertinggal dibanding laki-laki.



# 5 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Pada Februari 2025  
terlihat bahwa semakin  
tinggi pendidikan semakin  
besar kecenderungan  
untuk berpartisipasi  
dalam angkatan kerja





# BAB 5

## INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

### KILM 14 Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan *output*. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Teori *human capital* menjelaskan bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat antara lain: kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan, dan tambahan pendapatan.

KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja. Kategori tingkat pendidikan yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual disusun berdasarkan tingkat *International Standard Classification of Education* (ISCED) yang disesuaikan dengan variabel yang tersedia di Sakernas. Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) adalah tingkat pendidikan.

Pada periode Februari 2024 hingga Februari 2025, tidak terlihat adanya perbedaan signifikan pada komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan. Secara umum, sebagian besar penduduk bekerja masih berasal dari kelompok berpendidikan tingkat dasar (tidak tamat SD hingga tamat SMP), meskipun proporsinya menurun dari 52,67 persen pada Februari 2024 menjadi 46,72 persen pada Februari 2025. Sementara itu, penduduk dengan pendidikan menengah menunjukkan tren peningkatan dari 33,92 persen menjadi 36,33 persen pada

periode yang sama, menandakan adanya pergeseran tenaga kerja menuju kelompok berpendidikan lebih tinggi.

**Tabel 9 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2024–2025**

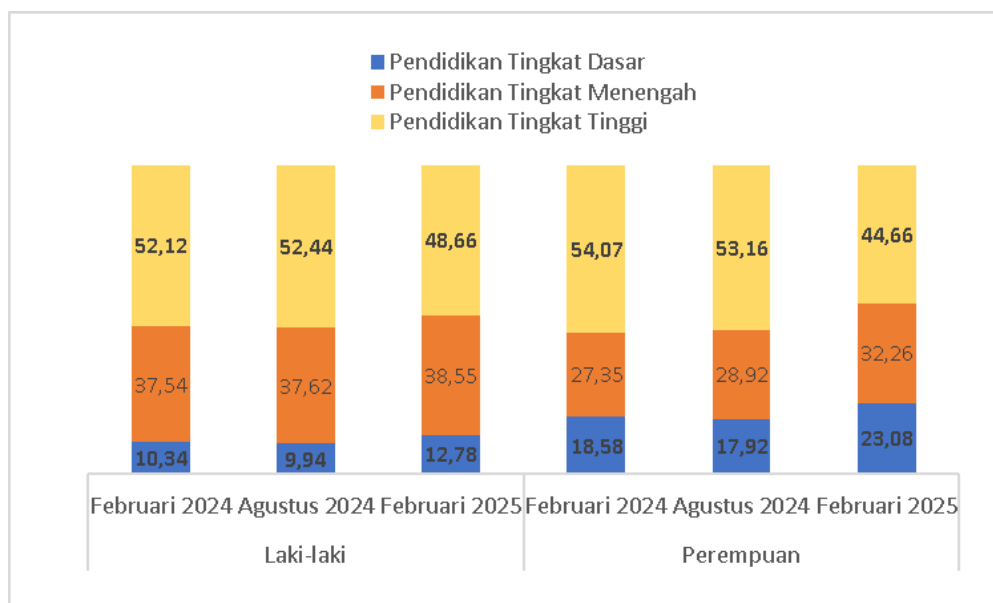
Tingkat Pendidikan	2023		2024
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	0,15	0,23	0,53
Pendidikan Tingkat Dasar (Tidak tamat SD hingga tamat SMP)	52,67	52,47	46,72
Pendidikan Tingkat Menengah	33,92	34,43	36,33
Pendidikan Tingkat Tinggi	13,27	12,86	16,43
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

Di sisi lain, untuk pendidikan tinggi, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 13,27 persen pada Februari 2024 menjadi 16,43 persen pada Februari 2025, sedangkan kelompok yang tidak pernah sekolah tetap menjadi bagian terkecil namun mengalami sedikit kenaikan dari 0,15 persen menjadi 0,53 persen.

Perubahan ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja di Indonesia, di mana proporsi pekerja berpendidikan menengah dan tinggi terus bertambah. Penurunan porsi tenaga kerja berpendidikan dasar menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan perlahan bergeser menuju tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan. Kondisi ini merupakan sinyal positif bagi peningkatan produktivitas nasional dan daya saing tenaga kerja.





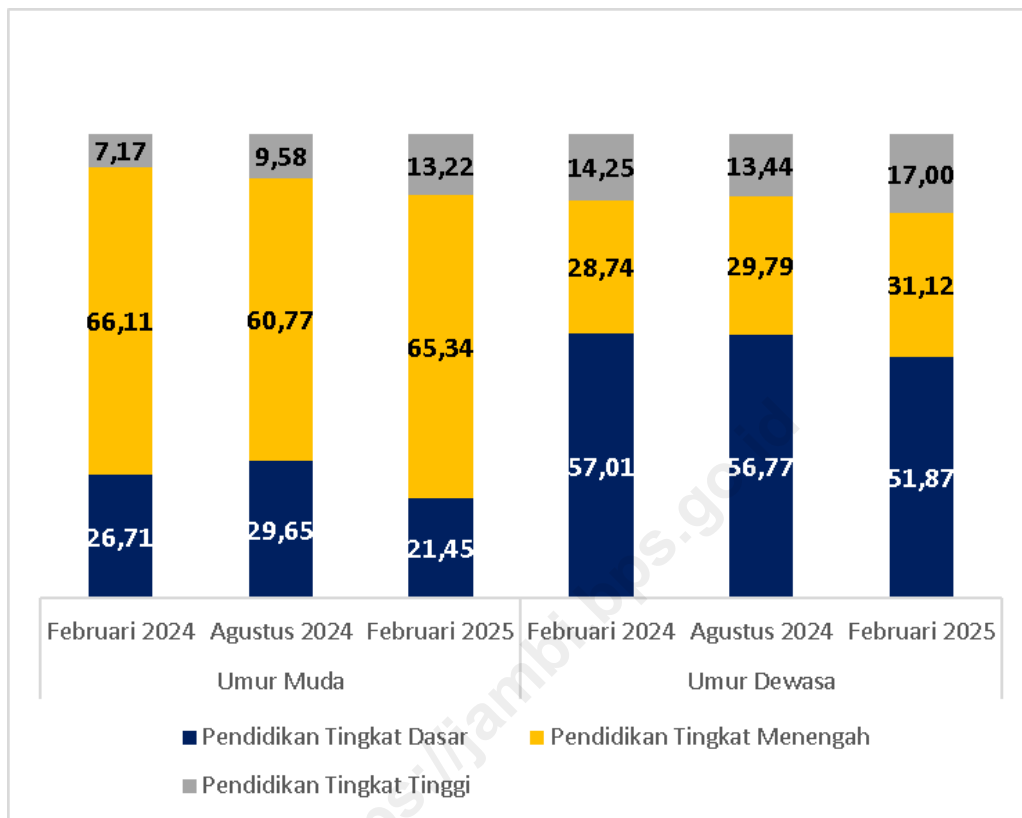
Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

**Gambar 22 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2024–2025**

Jika diamati menurut jenis kelamin, distribusi angkatan kerja perempuan yang berpendidikan tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebagai gambaran, baik pada laki-laki maupun perempuan, mayoritas penduduk bekerja masih berasal dari kelompok berpendidikan tingkat dasar, meskipun proporsinya menurun pada tahun 2025. Pada Februari 2024, penduduk laki-laki dengan pendidikan tingkat dasar tercatat sebesar 52,12 persen, sedikit menurun menjadi 52,44 persen pada Agustus 2024, lalu turun lebih lanjut menjadi 48,66 persen pada Februari 2025. Perempuan menunjukkan pola serupa, dengan proporsi 54,07 persen pada Februari 2024, turun menjadi 53,16 persen di Agustus 2024, dan menurun cukup signifikan menjadi 44,66 persen pada Februari 2025.

Sebaliknya, kelompok dengan pendidikan menengah dan tinggi mengalami peningkatan pada kedua jenis kelamin. Pada laki-laki, pendidikan menengah meningkat dari 37,54 persen menjadi 38,55 persen, sedangkan pendidikan tinggi naik dari 10,34 persen menjadi 12,78 persen sepanjang periode tersebut. Pada perempuan, peningkatan lebih terlihat pada kelompok berpendidikan tinggi, dari 18,58 persen di Februari 2024 menjadi 23,08 persen pada Februari 2025. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran positif dalam struktur ketenagakerjaan, di mana

semakin banyak penduduk, terutama perempuan, yang bekerja dengan latar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan yang lebih baik di kalangan angkatan kerja, serta potensi peningkatan kualitas tenaga kerja di masa mendatang.



Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

**Gambar 23 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari 2024 dan Februari 2025**

Jika dilihat menurut kelompok umur, terdapat pola yang berbeda antara kelompok umur muda dan kelompok umur dewasa. Pada kelompok umur muda, sebagian besar angkatan kerja berpendidikan menengah. Sedangkan, pada kelompok umur dewasa, sebagian besar angkatan kerja berpendidikan dasar ke bawah. Dengan kata lain, terjadi peningkatan kualitas pendidikan generasi muda dibandingkan generasi sebelumnya.

# 6 INDIKATOR UPAH & BIAYA TENAGA KERJA

Rata-rata upah/gaji selama sebulan untuk buruh/karyawan/pegawai sebesar 2,62 juta rupiah

<https://jambi.bps.go.id>





## BAB 6

# INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

### KILM 15 Upah dan Biaya Kompensasi

Besaran upah/pendapatan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja. Akan tetapi, salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan sebulan terakhir pada status pekerjaan tertentu sehingga pada publikasi ini hanya menyajikan rata-rata upah/gaji bersih sebulan terakhir buruh/karyawan/pegawai. Sakernas juga tidak mendata biaya kompensasi sehingga indikator tersebut tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

**Tabel 10 Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan Buruh/Karyawan/ Pegawai  
(juta rupiah), 2024–2025**

Rata-Rata Upah	2024		2025
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	2,87	3,06	2,80
Perempuan	2,19	2,34	2,26
<b>Total</b>	<b>2,60</b>	<b>2,83</b>	<b>2,63</b>

Sumber: Sakernas, Februari 2022–Februari 2024

Rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai di Provinsi Jambi pada Februari 2025 mencapai 2,63 juta rupiah. Rata-rata upah/gaji ini meningkat dibandingkan Agustus 2024 dan Februari 2024. Jika ditinjau menurut jenis kelamin Februari tahun 2024–2025, terlihat bahwa upah laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan pada setiap periode. Pada Februari 2024, rata-rata upah laki-laki mencapai 2,87 juta rupiah, meningkat menjadi 3,06 juta pada Agustus 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 2,80 juta pada Februari

2025. Sementara itu, upah perempuan mengalami pola serupa, yakni naik dari 2,19 juta pada Februari 2024 menjadi 2,34 juta di Agustus 2024, lalu turun menjadi 2,26 juta pada Februari 2025. Secara keseluruhan, rata-rata total upah meningkat dari 2,60 juta di awal 2024 menjadi 2,83 juta pada pertengahan tahun, namun kembali turun menjadi 2,63 juta pada awal 2025.

Dari pola tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan upah pada pertengahan tahun 2024, tren menunjukkan adanya penurunan kembali pada Februari 2025. Hal ini menandakan adanya fluktuasi upah yang mungkin dipengaruhi oleh faktor musiman, kondisi ekonomi, atau dinamika pasar tenaga kerja. Selain itu, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih terlihat jelas, menunjukkan bahwa isu kesetaraan upah belum sepenuhnya teratasi di pasar kerja.

# CATATAN TEKNIS

<https://jambi.bps.go.id>



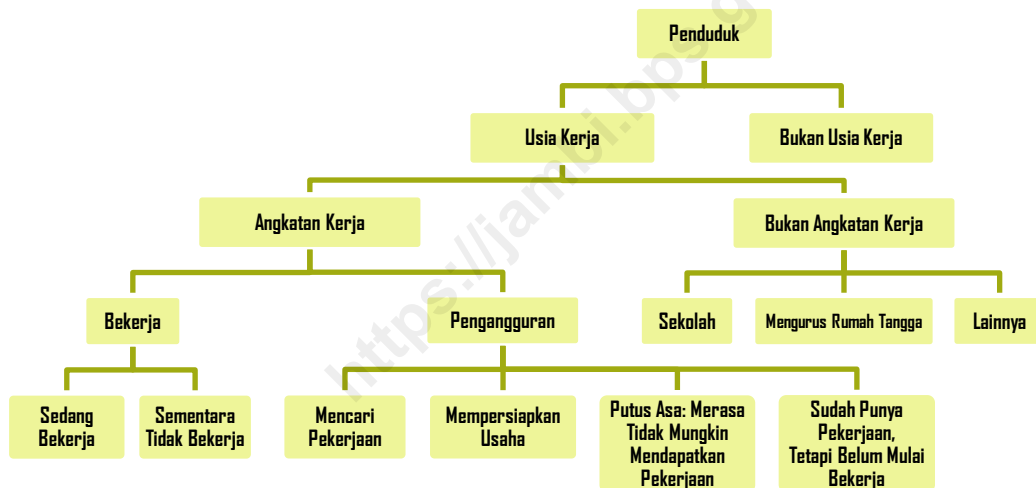




# CATATAN TEKNIS

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *"Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods"*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



**Gambar 24 Diagram Ketenagakerjaan dalam Sakernas**

Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 5 tahun). Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasi masing-masing negara. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (termasuk yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, Federasi Rusia, dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah

diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), di mana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total. Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode

referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan pekerjaan, jabatan, maupun status pekerjaannya.

### **Indikator Pasar Tenaga Kerja**

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*-ILO) meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) edisi ke-9 pada tahun 2015, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 17 (tujuh belas) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama), KILM 5 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama), KILM 6 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 7 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja), dan KILM 8 (Penduduk yang Bekerja di Kegiatan Informal);
3. Indikator pengangguran dan setengah penganggur (*underemployment*), yang terdiri dari KILM 9 (Pengangguran), KILM 10 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 11 (Pengangguran Jangka Panjang); KILM 12 (Setengah Pengangguran/ *underemployment*).

4. Indikator bukan angkatan kerja (ketidakaktifan), yang terdiri dari KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
5. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
6. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Upah dan Biaya Kompensasi);
7. Produktivitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 16 (Produktivitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 17 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

### **KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan pada lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

## **KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio*-EPR)**

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (*Employment to Population Ratio*-EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

## **KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara.

Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian; dan
7. Pekerja keluarga/tak dibayar

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

1. Buruh/karyawan/pegawai;
2. Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari:
  - a. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar;
  - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
  - c. Berusaha sendiri;
3. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
4. Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

#### **KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks



pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi lapangan pekerjaan disajikan dalam 17 kategori yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Tujuh belas (17) kategori yang dimaksud adalah :

- A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- B. Pertambangan dan penggalian;
- C. Industri pengolahan;
- D. Pengadaan listrik dan gas uap/air panas dan udara dingin;
- E. *Treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- H. Pengangkutan dan pergudangan;
- I. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- J. Informasi dan komunikasi;
- K. Aktivitas keuangan dan asuransi;
- L. Real estat;
- M,N. Jasa perusahaan;
- O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- P. Pendidikan;
- Q. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
- R,S,T,U. Jasa lainnya

#### **KILM 5. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama**

Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada ISCO 2008 dengan uraian jenis pekerjaan lebih

rinci. Dalam penyajian publikasi ini klasifikasi tersebut dikonversikan ke Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) 1982. Dengan kategori sebagai berikut:

0/1. Tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis;

1. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan;

2. Tenaga tata usaha dan yang sejenis;

3. Tenaga usaha penjualan;

4. Tenaga usaha jasa;

5. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;

7/8/9. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar;

X/00. Lainnya

## **KILM 6. Pekerja Paruh Waktu**

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea,

Amerika, dan El Salvador<sup>1)</sup>. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

### **KILM 7. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja**

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): 0 jam, 1–34 jam, 35–48 jam, dan 49 jam ke atas.

### **KILM 8. Penduduk yang Bekerja di Kegiatan Informal**

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dan sebagainya)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa

---

<sup>1)</sup> Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar, dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar, dan anggota koperasi produksi.

Sayangnya, BPS belum dapat menyajikan data pekerja sektor informal yang mengacu pada ICLS ke-17 karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas. Saat ini, BPS menentukan penduduk yang bekerja di kegiatan formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal.

## **KILM 9. Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif<sup>2)</sup>. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

1. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;

---

<sup>2)</sup> Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

2. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
4. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja

tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

#### **KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda**

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

#### **KILM 11. Pengangguran Jangka Panjang**

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi secara lengkap mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

### **KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)**

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

1. Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
  - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
  - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

### **KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan**

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK--lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurangi dengan TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat

ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

#### **KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf**

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

1. Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
2. Pendidikan tingkat dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
3. Pendidikan tingkat menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;



4. Pendidikan tingkat tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/S1, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun<sup>3)</sup>), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

#### **KILM 15. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja**

Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)—yang bukan merupakan bagian dari Sakernas—yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan sebulan terakhir pada status pekerjaan tertentu, maka yang dapat disajikan hanya rata-rata upah/pendapatan sebulan terakhir buruh/karyawan/pegawai. Biaya kompensasi tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

#### **KILM 16. Produktivitas Tenaga Kerja**

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat

---

<sup>3)</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

modal (*capital intensive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

#### **KILM 17. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan**

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

# DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Indikator Pasar Tenaga Kerja Februari 2023*. Edisi 2. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Pedoman Pencacahan Sakernas Februari 2025*. Edisi 1. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Maligalig, Dalisay S., Sining Cuevas, and Aleli Rosalio. 2008. *Informal Employment in Indonesia*. No 156. *Asian Development Bank*.
- ILO. 2016. *World Employment Social Outlook; Trend 2016*. Geneva : ILO.

<https://jambi.bps.go.id>





# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 4 Telanaipura, Jambi, 36122  
Telp. 0741-60497 Homepage : <http://jambi.bps.go.id>  
E-mail : [bps1500@bps.go.id](mailto:bps1500@bps.go.id)